



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI IV DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Kelautan dan Perikanan RI
Hari, Tanggal : Senin, 7 Juni 2021
Waktu : Pukul 10.20 s.d 13.40 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta
- Ketua Rapat : SUDIN, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020-2021;
2. Membahas ABT 2021;
3. RKA-K/L dan RKP-K/L 2022; dan
4. Isu-isu aktual
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Tommy
Hadir : A. Anggota DPR RI:
36 dari 54 orang Anggota Komisi IV dengan rincian:
1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)
5 dari 11 orang Anggota
 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 3. Ir. Mindo Sianipar
 4. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
 5. Maria Lestari, S.Pd.
 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
8 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil ketua
 2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 3. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
 4. Ir, Hanan A. Rozak, M.Si.
 5. Ir. Ichsan Firdaus
 6. Budhy Setiawan
 7. Ir. Panggah Susanto, M.M.
 8. Alien Mus

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-GERINDRA)
5 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil ketua
 2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 3. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
 5. Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrasi (F-NASDEM)
3 dari 6 orang Anggota
 1. H. Sulaeman L. Hamzah
 2. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 3. Yessy Melania, S.E.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil ketua
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Luluk Nur Hamidah, M.Si, M.P.A.
 4. Daniel Johan, S.E.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Suhardi Duka, M.M.
 2. Hj. Nur'aeni, S.Sos, M.Si
 3. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Drh. H. Slamet
 2. DR. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
 3. DR. Hermanto, S.E., M.M.
 4. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
2 dari 4 orang Anggota
 1. H. Muhammad Syarifudin, ST., M.M.
 2. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. Ema Umiyyatul Chusnah.
 2. K.H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.

B. Undangan:
Menteri Kelautan dan Perikanan RI

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan RI,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia,
Yang terhormat Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara,
Yang terhormat Direktur Utama PT. Garam,
Beserta hadirin yang kami muliakan.

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan rapat Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Tapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 8 April 2021 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 17 Mei 2021, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas:

1. Evaluasi APBN Tahun Anggaran 2021;
2. Anggaran Belanja Tambahan 2021;
3. RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2022; dan
4. Isu-isu aktual lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Tatib, Rapat Kerja ini kami nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Raker hari ini kita mulai pada pukul 10.20 WIB dan akan diakhiri pada pukul 14.20 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (2) Peraturan Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap hal-hal di atas tadi;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas Komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib antara lain mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang

meliputi Rencana Kerja Pemerintah serta Rencana Kerja dan Anggaran Lementierian dan Lembaga dalam ruang lingkup tugas Komisi dan usulan Anggota program pembangunan Daerah Pemilihan bersama dengan Pemerintah. Jadi Menteri jangan dibalik-balik ini, yang memutuskan anggaran itu kita, kementerian hanya menyajikan. Kalau kita tidak setuju berarti hal tersebut bisa kita batalkan.

Selanjutnya hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja pada hari ini adalah sesuai dengan surat Badan Anggaran Nomor AG/06530/DPRRI/IV/2021, tanggal 20 Mei 2021 mengenai penyampaian perubahan rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebagai acuan dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2022 dan RKP Tahun 2022 antara Komisi dengan mitra kerjanya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Indonesia mengalami tekanan ekonomi sejak awal tahun 2020 hingga 2021, sebab seluruh dunia mengalami pandemi covid-19. Karenanya sangat diperlukan akselerasi Pemerintah dalam menjaga kestabilan keuangan negara agar tidak terjadi kegagalan ekonomi. Alternatif action Pemerintah dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masyarakat tetap berjalan beriringan. Diperlukan program dan kegiatan yang mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi dan penguatan pemberdayaan masyarakat, namun juga disertai dengan penugasan penanganan covid-19, serta memperkuat ketahanan ekonomi domestik, peningkatan iklim investasi, mendorong inovasi dan daya saing, perbaikan kualitas SDM dan peningkatan produktivitas melalui informasi di bidang Pendidikan, pelatihan, vokasi dan penelitian sektor kelautan dan perikanan. Maka pada Rapat Kerja hari ini Komisi IV DPR RI melakukan evaluasi terhadap anggaran 2021-2020 di mana terdapat catatan penting, yang pertama dari data Komisi IV DPR RI selama 5 tahun terakhir tercatat bahwa anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan kurang dari 1% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Indonesia. Hal ini perlu dukungan secara nyata terhadap anggaran KKP tahun 2020 dapat ditingkatkan.

Pada tahun 2020 KKP melakukan ABT sebesar Rp114,8 miliar untuk mengatur pemberdayaan masyarakat pembudidaya, seperti kelompok ikan, konsumsi udang, ikan hias, cacing sutera, kepiting, budidaya ikan dalam ember, namun sampai saat ini tidak terealisasi. Sehingga mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah menurun. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran tersebut beserta pendamping dan direalisasikan pada tahun 2020.

Berdasarkan laporan Menteri Keuangan, serapan anggaran KKP per 1 Juni 2021 masih sangat kecil, yakni 30,57% sehingga Komisi IV DPR RI meminta penjelasan akan hal tersebut di atas, dan mempercepat realisasi anggaran sisa tahun 2021. Ini kalau nggak salah hanya tinggal 5 bulan lagi, karena siklusnya biasa tanggal 15 Desember sudah selesai.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI juga membahas tentang RKA-K/L dan RKP-K/L tahun 2022, di mana berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri

PP/Bappenas S-361/MK.02/2021 dan B238/M.PPN/DVIII/PP0402/04/2021, tanggal 29 April 2021, perihal pagu indikatif belanja KL Tahun 2022 dan KKP mendapatkan alokasi sebesar Rp6.122.087.397.000,00.

Negara kita sebagian besar laut, entah pemikiran dari mana ini, ini mohon maaf saya ngomong apa adanya. Entah di Bappenasnya, entah di Keuangannya, atau usulan dari KKP. Kalau Rp6 triliun itu apa yang mau kita kerjakan. Kenapa sih nggak dikasih Rp10 triliun atau Rp12 triliun. Tadi pagi saya dapat berita bahwa PSDKP menangkap lagi sekian kalau nggak salah 10 kapal di daerah Natuna atau dekat Pontianak. Coba kalau kapal patrolinya dua kali lipat makin banyak lagi yang ditangkap, makin bagus lagi untuk kita, pencurian ikan makin diperkecil. Maka daripada itu diperlukan pembahasan dan pendalaman secara terukur. Efisien dan efektif terhadap program dan kegiatan prioritas yang mendukung. Percepatan pemulihan ekonomi yang panjang yang ditunjang dengan system jaminan mutu, integrated, one system dan sistem ketelusuran produk hasil kelautan dan perikanan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Beberapa hal isu yang actual dan perlu dicermati adalah kebijakan ekspor benih-benih lobster yang belum dicabut secara resmi oleh Kementerian Perikanan. Hal ini Komisi IV DPR RI minta penjelasannya.

Yang kedua, adanya kewenangan yang tidak tuntas dan tidak jelas dalam hal pengelolaan pelabuhan perikanan Samudra Antara KKP, Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan dengan Perum Perindo. Jadi yang mengambil sewanya itu Perindo, menurut Perindo infrastruktur itu menjadi tanggung jawab KKP. Betul Pak Zaini anda menjawab begitu kemarin ya, saya nanti minta penjelasan ini. Yang ngambil duit siapa, yang memperbaiki jalan siapa. Kemudian di situ ada pasar ikan higienis, pasar ikan higienisnya di belakang, gedungnya kosong, inikan sangat disayangkan. Dari awal saya sudah sangat menolak sekali, bahkan saya bilang sama Ketua saya yang dulu "jangan datang, jangan datang waktu peletakan batu pertama", tapi *alhamdulillah* yang bersangkutan sempat dan hadir di sana. Yang mengakibatkan buruknya tata kelola, hal ini tercermin dalam kondisi PPS yang tidak modern, tidak bersih dan tidak higienis, baunya lumayan menyengat. Kemarin Komisi IV DPR RI datang kesana harusnya saya larang datang kesana, karena Perindo tidak punya hak mengundang. Yang boleh mengundang itu adalah induknya, induk dari Perindo, RNI. Kemarin sudah saya ingatkan kepada staf ahli ya saya tidak mau hal itu terjadi lagi.

Dan telah terjadi operasi tangkap tangan pada tanggal 5 Juni 2021 di mana salah satu ASN stasiun karantina pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Batam kedatangan menerima sejumlah uang dalam bentuk Dolar Singapura dan Rupiah. Dengan modus kasus mengeluarkan Surat Persetujuan Muat (SPM) untuk ekspor udang. Hal ini perlu diperhatikan Kementerian Kelautan beserta jajaran agar tidak terulang lagi.

Sebelum saya memulai diskusi lebih panjang, kemarin Pak Menteri saya sudah bicara dengan Eselon I dan Pak Sekjen, perihal Bansos untuk baik itu bulan mutu dan lain-lain dalam bentuk paket sembako, makanan, saya minta penjelasan. Karena mohon maaf kami selama ini memberikan cek kosong, sudah kelola sendiri dan

hampir semua wilayah yang ada Komisi IV DPR RI kecewa. Pakai EO, EO-nya saja berapa puluh persen, kenapa tidak menggunakan pejabat KKP yang ada di daerah masing-masing, UPT atau Karantina suruh mereka saja yang bekerja. Mereka yang mengemas, mereka yang membuat, bagaimana cara pengirimannya? Bekerja sama sama Gojek atau Gosend. Jadi tidak perlu dikelola dari Jakarta, tidak perlu pakai EO, sekarang Gojek dan Gosend kan kita tahu sendiri kondisi saat ini merek sedang hidup agak kurang bagus, salah satunya ya sudah pakai sistem itu saja. Pakai EO mungkin harus memangkas 20-30% EO-nya saja. Dan kami juga nanti sebelum dibagikan harus jelas isinya apa saja, berapa nilai.

Yang kedua mengenai bantuan benih ikan, kemarin dalam rapat ini sudah saya jelaskan, Komisi IV DPR RI menyalurkan bantuan 1 juta bibit ikan tapi *alhamdulillah* bibit ikannya segede korek api, itu sebelum sebulan pun sudah pasti mati.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian yang kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada saudara Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan penjelasan hal-hal tersebut di atas.

Silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih Ketua.

Bismillahirrahmanirahim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu,
Namo Buddhaya.*

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan Bapak-Ibu Anggota Komisi IV DPR RI.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Interupsi Pimpinan.
Kurang maju suaranya Pak Menteri, mic-nya kurang maju.

KETUA RAPAT:

Dia ingin Pak Menterinya semangat walaupun cuma Rp6 triliun.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./ WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya begitu kira-kira Ketua.
Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Selalu semangat Ibu.
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, sebentar sebelum Pak Menteri melanjutkan kami seluruh Pimpinan dan Komisi IV DPR RI turut berduka cita atas wafatnya saudara Memet Eselon II atau Direktur dari Kementerian KKP karena kena covid. Jadi kita harus saling mengingatkan, saling menjaga dan saling mendoakan agar kita senantiasa sehat selalu.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan Rapat Kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI.

Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas dukungan pencapaian KKP dalam merealisasikan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2020, realisasi penyerapan anggaran KKP tahun 2020 mencapai Rp4,81 triliun dari total anggaran Rp5,27 triliun atau 91,3% yang telah direalisasikan untuk kegiatan-kegiatan prioritas bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing, pengelolaan ruang laut, pengawasan SDKP, karantina ikan, serta riset dan pengembangan sumber daya manusia.

Kami menyadari bahwa realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 belum maksimal dikarenakan ada beberapa kegiatan yang terjadi gagal bayar, seperti kegiatan bantuan sarana budidaya yang bersumber dari anggaran belanja tambahan tahun 2020, di mana dipa baru terbit pada Agustus 2020. Tentu hal ini akan menjadi perhatian utama di setiap unit kerja Eselon I agar dapat memaksimalkan serapan anggaran di tahun berjalan ini.

Terkait dengan realisasi penyerapan anggaran KKP Tahun 2021 data per 1 Juni 2021 menunjukkan realisasi mencapai Rp1,58 triliun atau 24,7% dari total pagu anggaran Rp6,562 triliun. Apabila dibandingkan dengan pagu setelah dilakukan pengamatan tunjangan kinerja dan gaji ke-13 sebesar Rp131 miliar, maka realisasi adalah sebesar 30,57% dari pagu akhir sebesar Rp6,43 triliun. Beberapa kegiatan masih dalam persiapan dan proses pengadaan, antara lain kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan, bantuan premi asuransi nelayan, revitalisasi gudang garam rakyat, integrasi lahan garam, chest freezer, pasar ikan, bantuan premi asuransi usaha budidaya ikan skala kecil, sarana produksi usaha perikanan budidaya, dan kegiatan yang bersifat konstruksi fisik lainnya.

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Terkait agenda pembahasan yang kedua, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-37/MK.2/2021, tanggal 16 Maret 2021, KKP mendapatkan alokasi Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp43,34 miliar yang dimanfaatkan untuk kegiatan penanaman mangrove di 4 provinsi dengan target luasan sekitar 2,008 hektar, 2000 hektar, yakni Provinsi Jawa Tengah 6 kabupaten, Jawa Barat 10 kabupaten kota, Banten 3 kabupaten kota, dan Jawa Timur 11 kabupaten kota.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa penanaman bibit mangrove, bantuan sarana, upah padat karya dan kegiatan pendukung lainnya. Dapat kami laporkan bahwa perkembangan dari pelaksanaan kegiatan ini, antara lain Provinsi Jawa Tengah dalam tahap identifikasi lokasi dan rencana penanaman dilakukan pada minggu ke-4 bulan Juni. Provinsi Jawa Barat dan Banten dalam tahap pengadaan bibit dan ajir dan rencana penanaman akan dilakukan pada minggu ke-1 Juni. Provinsi Jawa Timur dalam tahap verifikasi kelompok pelaksana penanaman dan rencana penanaman akan dilakukan pada minggu ke-2 Juni.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-361 dan B.238, tanggal 29 April 2021, perihal pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga TA 2022. KKP mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6,122 triliun dengan terdiri dari belanja operasional sebesar Rp2,6 triliun dan belanja non operasional sebesar Rp3,5 triliun. Pagu indikatif tahun 2022 ini turun dari pagu alokasi tahun 2021 sebesar Rp6,5 triliun. Adapun rencana pagu indikatif tahun anggaran 2022 per program terdiri dari program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp2,18 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp187,3 miliar, program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp86,98 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp273 miliar, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp59,94 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp3,32 triliun.

Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan rancangan kegiatan prioritas unit kerja Eselon I KKP tahun 2022 sebagai berikut:

Yang pertama kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Tangkap, antara lain penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemungutan PNBP sumber daya alam perikanan tangkap pasca produksi, bantuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan, seperti kapal perikanan 5 GT, alat penangkapan ikan, fasilitas sertifikat hak atas tanah nelayan, diversifikasi usaha nelayan, premi asuransi nelayan, kampung nelayan maju, dan fasilitas jaminan hari tua nelayan, pengembangan korporasi nelayan, perijinan usaha melalui silat dan simkada, pengelolaan perikanan berbasis BPPN RI dan penerapan e-log book penangkapan ikan, serta bakti nelayan.

Yang kedua kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Budidaya, antara lain revitalisasi kawasan tambak udang dan bandeng, pembangunan shrimp estate, pembangunan kampung perikanan budidaya, bantuan sarana prasarana budidaya pakan mandiri, serta bimbingan teknis bagi para pembudidaya ikan.

Yang ketiga kegiatan prioritas Ditjen Penguatan Daya saing, antara lain pembangunan sentra kuliner ikan, pengembangan prasarana raiser ikan hias, serta pengelolaan ikan, sarana pasca panen, kampanye gemar ikan, promosi produk

perikanan secara internasional, pasar ikan, chest freezer, peralatan pengolahan, gudang beku pada kawasan shrimp estate dan sentra produksi perikanan tangkap, implementasi sistem resi gudang, kendaraan pendingin, pabrik es, serta bimbingan teknis dan fasilitas UMKM untuk keberlanjutan usaha.

Yang keempat kegiatan prioritas Ditjen Pengelolaan Ruang Laut antara lain pengelolaan kawasan konservasi, rehabilitasi kawasan mangrove, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, bantuan kelompok penggerak konservasi, gerakan cinta laut, penanganan sampah di pesisir, rencana zonasi di KSN, KSNT, pengembangan usaha garam rakyat, sarana prasarana wisata bahari, dermaga apung dan bantuan ekonomi produktif di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kegiatan bimbingan teknis pada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Yang kelima kegiatan prioritas Ditjen Pengawasan PSDKP, antara lain operasional kapal pengawas, operasional pesawat patrol, pembangunan kapal pengawas, operasional sistem pemantauan SDKP, operasional speed boat, pembinaan dan bimbingan teknis pada Pokmaswas, operasional pengawasan kepatuhan kapal perikanan, operasional pengawasan kawasan konservasi dan destructive fishing.

Yang keenam kegiatan prioritas Badan Riset SDMKP, antara lain pelatihan masyarakat KP, penyuluhan kelompok pelaku utama atau usaha KP, penyelenggaraan pendidikan vokasi, riset perikanan, riset kelautan, riset pengolahan produk dan bioteknologi KP, model sosial dan ekonomi, melakukan kajian stock atau stock assessment di wilayah pengelolaan perikanan, dan WPP perairan daratan, dan penyediaan atau rehabilitasi sarana prasarana untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan sumber daya manusia.

Yang ketujuh kegiatan prioritas Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, antara lain pengawasan mutu hasil perikanan, sarana prasarana pengujian mutu, layanan sertifikasi karantina, penyelesaian kasus pelanggaran karantina ikan, sarana prasarana pengawasan karantina, penerapan standar sistem manajemen mutu dan pengawasan di wilayah perbatasan, serta bulan mutu karantina ikan.

Yang kedelapan kegiatan prioritas Sekretaris Jenderal, antara lain layanan penyiapan produk hukum sumber daya manusia aparatur dan organisasi, keuangan, perencanaan, kerja sama antar lembaga, administrasi dan pengadaan barang dan jasa, humas dan kerja sama luar negeri, data dan statistic, pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan, serta sosialisasi pemanfaatan dana kelola BLU.

Yang kesembilan kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal, antara lain pengawasan akuntabilitas mitra Inspektorat I-V dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Bapak, Ibu Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa mengingat masih banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam pagu indikatif tahun 2022, serta untuk dapat melaksanakan kegiatan prioritas

utamanya untuk kepentingan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan, maka KKP mengusulkan penambahan pagu anggaran sebesar Rp8 triliun. Mudah-mudahan disetujui Pak, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp236,61 miliar untuk pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran di pusat dan di daerah. Yang kedua, belanja non operasional sebesar Rp7,806 triliun yang digunakan dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional dan terobosan KKP.

Adapun rincian kegiatan usulan tambahan pagu anggaran sebagaimana yang telah kami sampaikan, yang pada intinya adalah untuk penguatan kehadiran Pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu kami mohon dukungan dari Komisi IV DPR RI.

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Demikian yang dapat kami sampaikan pada Rapat Kerja kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI yang sangat besar kepada KKP. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dilaksanakan program dan kegiatan KKP.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semuanya,
Om santi-santi om,
Namo Buddhaya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya saudara Menteri.

saya minta tolong kalau bisa nanti disetting ulang, bisa nggak satu program itu yang benar-benar menukik untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kalau kita lihat kalau programnya misalnya program ikan hias dalam ember, inikan nggak greget sekali, nggak nendang, nggak bunyi. Jadi mau saya itu satu kawasan yang luas supaya lebih jelas dan terukur, Kementerian Kelautan dan Perikanan gampang memeriksanya dan mengauditnya, begitu pula kami gampang mengecek ke lapangan.

Satu lagi yang paling penting adalah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan belum ada perihal bimbingan teknis. Kalau dari Kementerian Pertanian sudah diputuskan kemarin, contoh kelompok mana yang dapat bantuan, bantuannya biasanya diambil oleh sang ketua, anggota hanya melongo, melihat, dan hanya tepuk dada saja, ketua lagi, ketua lagi. Paling tidak setiap Eselon I ada bimbingan teknis, misalnya Dirjen Tangkap mengumpulkan para nelayan memberikan bimbingan teknis. Ini loh peraturannya, kalau minta ijin ini loh, kalau mau dapat bantuan ini loh. Begitu juga dengan Dirjen Budidaya, kumpulkan kelompoknya, mana yang mau dapat peraturannya 1, 2, 3, 4, 5.

Jadi Pak Menteri, kemarin ini saya sangat tergelitik ada Anggota Komisi IV DPR RI yang mengatakan "Pak Menteri Pertanian, anda pikirkan jangan hanya kaki empat

yang dipikirkan, tetapi kaki duanya yang dipikirkan”, itu termasuk di benak saya langsung saya berpikir maksudnya apa, jangan hanya ngasih bantuan sapi tetapi manusianya tidak mampu, tidak punya kemampuan. Nah, ini kendalanya.

Saya rasa begitu saja, terima kasih atas penjelasannya yang disampaikan. Selanjutnya kami persilakan Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan atau pertanyaannya.

Kami persilakan.

PERGANTIAN KETUA RAPAT

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik, yang pertama dari pengamat kita mudah-mudahan tidak sampai 2 jam pengamatannya Bapak Dr. Hermanto. Bapak mau awal, mau nanti belakangan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sekarang saja.

KETUA RAPAT:

Oh, sekarang.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Komisi IV DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Eselon I KKP Republik Indonesia, serta hadirin yang kami hormati.

Ijinkan saya menyampaikan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Mudha-mudahan sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh Pimpinan. Data BPS tahun 2020 juga mengungkapkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan telah menyumbang 14,2% terhadap struktur PDB nasional dengan nilai Rp2.115 triliun atau berada di urutan kedua setelah industri pengolahan 20,6% senilai Rp3.086 triliun. Pada tahun ini juga sektor pertanian tercatat menjadi satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh positif pada saat PDB nasional kontraksi 2,07%. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan tumbuh 1,75% dibandingkan sektor pertambangan minus 1,95%. Industri pengolahan minus 2,93% dan konstruksi minus 3,25% sedangkan perdagangan dan reparasi minus 3,72%, serta sektor lainnya minus 1,7%. Namun, data tersebut jika kita kerucutkan lagi kontribusi sektor perikanan masih berkisar antara 1% sampai 3% dari PDB Nasional. Artinya KKP masih memiliki tugas berat untuk mendorong peningkatan kontribusi kontribusi tersebut.

Oleh karena itu, sebagai bukti konkrit dukungan kepada KKP Fraksi PKS bersama dengan seluruh komponen Komisi IV DPR RI telah bersepakat untuk mendorong kenaikan pagu indikatif KKP dan awalnya hanya sebesar Rp6,122 triliun untuk dinaikkan menjadi kurang lebih Rp14 triliun atau penambahan Rp8 triliun. tujuannya agar KKP dapat mengeluarkan kebijakan yang secara komprehensif mampu mendorong peningkatan kegiatan nelayan, pembudidaya ikan dan pertambangan garam.

Bapak-Ibu dan hadirin semuanya.

Bila saya bacakan ini bisa menghabiskan waktu 2 jam kata Pimpinan tadi.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Lanjutkan saja Pak Hermanto, Pak Hermanto lanjutkan biar yang nanti *break* dulu.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Namun, karena ini terlalu banyak point yang harus saya bacakan ada 20 halaman. Saya menganggap keseluruhan daripada isi ini adalah bagian daripada keseluruhan yang kami bacakan ini. Jadi intinya kami mendukung kerja-kerja dan anggaran yang disusun oleh KKP, bila penting itu adalah menaikkan sebesar yang kami sebutkan tadi.

Kemudian seperti yang kami dengar tadi Pimpinan, tentu kami mendukung bahwa tidak saja kaki empat tapi kaki dua juga perlu diperhatikan. Kemudian ini pesan dari Dapil saya Pak Menteri, di Dharmasraya itu di Nagari....

KETUA RAPAT:

Ijin, Dapil Bapak itu dari mana?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sumba I.

KETUA RAPAT:

Oh, Sumatera Barat.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Saya sudah jalan dengan Pak Menteri.

Terima kasih Pak Menteri.

Pak Menteri luar biasa, malah saya kalah ngikutin dia.

Jadi di Dharmasraya itu ada di Kecamatan Pulau Kunjung itu ada fasilitas kalau saya cermati di situ adalah untuk keperluan di situ sudah terbengkalai kantor kemudian juga terbengkalai semacam bioflok yang lebih luas dibandingkan dengan yang biasa-biasanya. Pihak di sana meminta supaya ini dipercepat supaya itu adalah

untuk mendukung kawasan ikan di daerah Dharmasraya. Oleh karena itu, kami minta supaya ini pun juga SDM-nya di sana kabarnya juga sudah sedia. Jadi ada SDM di sana yang PNS dari KKP untuk bisa dioptimalkan di sana.

Nah, itu hadirin yang perlu kami sampaikan. Ini sebenarnya ini dari yang disampaikan oleh Kapoksi kepada saya ini diamanatkan ini ada 7 point untuk kementerian, kemudian ada pertanyaan lain yang relevan untuk Ditjen Perikanan Tangkap sebanyak 1 point tapi a, b, c, kemudian Ditjen Pengelolaan Ruang Laut ada 4 pertanyaan, kemudian Ditjen perikanan Budidaya ada satu pertanyaan.

KETUA RAPAT:

Pak Doktor disampaikan saja nggak usah disebutin.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Penguatan daya saing banyak, jadi saya secara resmi Pimpinan saya serahkan saja.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Ini sejarah ini Pak Doktor menyampaikan dalam sangat singkat 15 menit. Selanjutnya dari Fraksi Gerindra Ibu Renny dipersilakan, ini sudah melalui terapi di Dokter Terawan sudah kelihatan cerah dan kecepatan mengalir darahnya akan cepat, sehingga pertanyaannya cukup 1 menit.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTY, S.E., S.PN.):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk semua,

Shalom,

Om swastyastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan,

Salam Indonesia raya.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,

Yang saya hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI beserta seluruh pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Mewakili Fraksi Partai Gerindra, ada beberapa catatan yang akan kami sampaikan kepada Bapak dari paparan-paparan yang disampaikan kepada kami tadi. Yang pertama, Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi dan mendorong setiap satuan kerja KKP dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran KKP tahun 2021, terutama yang terkait

dengan program kegiatan prioritas KKP tahun 2021 yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pelaku usaha Kelautan dan Perikanan, agar para pelaku usaha tersebut bisa aktif dan terus memproduksi di masa pandemi ini untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan mengenai hal ini.

Kemudian yang selanjutnya pada rapat Komisi IV DPR RI dengan pejabat Eselon I tanggal 31 Mei 2021 yang lalu, satuan kerja KKP itu meminta penambahan anggaran yang tertinggi di Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap jumlah penambahan anggaran keseluruhan, yaitu Rp8,4 triliun. Dari usulan tambahan anggaran tersebut tahun 2022, Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan terkait target PNBP sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2022, sebab kami melihat rata-rata PNBP dari sektor Kelautan dan Perikanan tiap tahunnya masih rendah, ini berkisar Rp600 miliar. Ini kami mohon penjelasan dan minta tanggapan dari Bapak mengenai target PNBP pada tahun 2022.

Yang selanjutnya Fraksi Partai Gerindra sangat prihatin dengan masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dan ini karena tidak memadai jumlah kapal pengawasan KKP yang beroperasi. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pimpinan tadi, kami Fraksi Partai Gerindra juga mendukung Pimpinan tadi untuk meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dapat segera melakukan penambahan armada kapal pengawas perikanan bertipe kapal cepat yang diprioritaskan untuk memperkuat pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, serta mempertimbangkan untuk pengadaan pesawat pengawas perairan. Ini untuk mengurangi *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia.

Yang selanjutnya kami juga berharap kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk segera melakukan pengembangan dan kelembagaan KKP di daerah dan penambahan tenaga penyuluh perikanan agar program strategis dari KKP yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sektor perikanan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, kami dari Fraksi Partai Gerindra meminta secara khusus kepada Menteri KKP untuk memperhatikan upah atau honor, serta kesejahteraan para tenaga honor atau penyuluh di daerah. Mengingat keberadaan penyuluh sektor perikanan terutama perikanan budidaya memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan budidaya.

Itu saja catatan dari kami untuk disampaikan kepada Kementerian Perikanan dan Kelautan. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan nanti secara tertulis akan kami sampaikan langsung kepada Pak Menteri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih.

Selanjutnya ini yang wanita paling bahagia karena di seluruh provinsinya bupatinya saudaranya, Ibu Alien Mus. Lagi bahagia semua bupatinya saudaranya, dia tinggal duduk saja jadi gubernur ke depan, tapi untuk duduknya itu yang susah.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan Kang Dedi, mudah-mudahan juga jadi gubernur.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Bapak-Ibu Anggota kom IV DPR RI yang saya kasihi dan saya sayangi,
Dan tentunya yang saya hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan juga yang luar biasa bersama Eselon I.

Saya ingin menyampaikan bahwa kita ini sudah masuk di bulan enam, kita masih punya enam bulan lagi untuk target pencapaian anggaran realisasi tahun 2021. Kemudian tadi sudah disampaikan beberapa Anggota Komisi IV DPR RI dan juga sempat disinggung oleh Ketua Komisi IV DPR RI tentang prioritas program anggaran untuk KP tepat sasaran seperti apa. Tapi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Menteri, bahwa tadi sudah disinggung oleh PNPB. Saya ingin menanyakan target di tahun 2021 PNPB yang ditargetkan pencapaiannya seperti apa dan sekiranya kita bisa disampaikan berapa jumlahnya.

Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa adanya masalah tentang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Konservasi, di situ ada terumbu karang ini bagaimana, karena saya harapkan bahwa apa yang menjadi habitat yang ada di perairan, baik di perairan laut maupun di perairan sungai dan mungkin yang berurusan dengan perairan itu masuk dan tanggungjawabnya ada di Kementerian KKP. Mungkin bisa kita dorong bersama ini Pimpinan, karena ini *sorry to say* adanya illegal atau ekspor illegal untuk terumbu karang, ini harus jadi pusat perhatian kita. Sementara saya melihat bahwa Kementerian KKP juga sangat memperhatikan terumbu karang dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul memperhatikan habitat alam yang ada di perairan laut.

Kemudian saya ingin menyampaikan ke Kementerian Kelautan, bahwa tolong disampaikan kepada nelayan-nelayan yang di atas 30 GT. Mungkin ini harus menjadi perhatian, kalau memang diberlakukan PNPB 30 GT ke atas saya pikir itu sangat luar biasa karena ini juga untuk memperhatikan nelayan-nelayan kita yang kecil. Terus saya mendengar langsung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Sekjen dan Eselon I kemarin luar biasa strategi untuk penanganannya tetapi mungkin kita disampaikan bagaimana untuk fokus kepada nelayan-nelayan besar dan betul-betul mereka itu harus memberikan juga dampak atau mungkin memberikan satu pungutan yang bisa memberikan pelayanan yang baik untuk para ABK-nya, untuk kelayakan kapalnya, karena kita ketahui bersama banyak sekali kapal tangkap yang keluar dari pelabuhan itu tidak ada standar mutu kelayakannya sehingga ada kejadian masalah-masalah dan sebagainya.

Kemudian Pak Menteri, saya ingin mempertanyakan tentang New Port yang ada di Ambon, apakah itu untuk pelabuhan. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, tapi saya ingin penegasan lagi dari Kementerian KP agar bisa, maksud saya begini kalau seandainya pelabuhan itu dibangun untuk perikanan ada baiknya pelabuhan tersebut ditanggungjawabkan atau dibebankan anggarannya kepada Menteri KKP gitu, jangan sampai di Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Karena yang mengetahui standarisasi dari kapal atau dengan pelabuhan tersebut ada di KP, jadi anggarannya mungkin harus digeser atau adalah lobby-lobby yang dilakukan oleh Kementerian terkait.

Kemudian saya ingin menyampaikan Ketua, kita juga memiliki satu masalah yang luar biasa tentunya *illegal fishing*. Ini harus jadi atensi dari Kementerian KKP yang mungkin Satgas 115 itu kalau kapalnya cuman sedikit ya ditambahin. Kalau Rp8 triliun ditambah dengan Rp6 triliun jadi dengan Rp14 triliun *something like this* ini mungkin anggarannya sungguh sangat masih kecil, karena luas lautan di seluruh Indonesia ini sungguh sangat luas daripada daratannya, berarti kita harus ada atensi yang luar biasa terhadap kelautan kita. Sering terjadinya *illegal fishing*, sering terjadinya pencurian ikan yang memakai bendera Indonesia tapi ternyata itu kapal orang asing, ini bagaimana penanganannya.

Kemudian Budidaya, Budidaya seperti disampaikan teman-teman kemarin, walaupun mungkin mereka tidak memiliki laut tapi mereka juga memiliki sungai atau mungkin bisa dibudidayakan ikan-ikan yang kemarin, seperti di Kalimantan Barat terus juga Pak Hermanto kemarin yang dikunjungi Pak Menteri itu di danau apa ya itu namanya saya lupa lagi, beliau sering sekali meminta untuk membudidayakan ikan yang hampir punah. Saya lupa namanya ikan, ya itu ikan itu hampir punah tapi saya lupa namanya karena saya nggak sering makan ikan yang kecil-kecil. Ya itulah seperti itu karena ini harus menjadi perhatian ikan yang hampir punah.

Kemudian kemarin juga dari Kalimantan Barat, terus kemarin juga disampaikan Pak Ketua, bahwa harus ada atensi untuk wilayah timur, seperti Bitung, seperti Manado Sulawesi Utara, ini saya nggak tahu pendekatannya karena antar apa tapi memang betul juga Bitung, dan Manado, Papua juga itu harus menjadi perhatian dari KP. Untuk lumbung ikan nasional saya berterima kasih sekali atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Sekjen melewati penyampaian tertulis Rp4,2 triliun ada di Maluku dan Maluku Utara. Semoga ini mendapat manfaat dan semoga ini juga menjadi atensi dari KP dan kita juga saya berterima kasih kalau memang sekarang itu kegiatan-kegiatannya sudah menjadi prioritas dari KP.

Itu saja Ketua, jangan menatap saya seperti itu, karena kalau saya ditatap bahaya ini barang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Alien.
Saya tidak menatap hanya melihat dalam waktu 5 menit.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Salam, salam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Wa'alaikum Salam.

Orang bahagia itu begitu, jadi apa pun ucapannya, apa pun pandangan orang menjadi kebahagiaan. Mudah-mudahan tambah satu lagi provinsinya bisa di dapat oleh Mbak Alien, sehingga Mbak Alien nggak usah lagi nanya sama Menteri, tapi nanti ditanya sama Menteri.

Terima kasih.

Selanjutnya sekarang Ibu Yessy, jangan main HP saja ayo nanya dong.

F-NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Baik Ketua, terima kasih waktunya.

Yang saya hormati Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Menteri beserta jajaran dari Eselon I KKP yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pertama, Fraksi NasDem menyoroti sama dengan Fraksi yang lain terkait anggaran. Kami mencoba melihat di realisasi penyerapan APBN di tahun 2020 untuk KKP ini yang terendah ada di Ditjen Perikanan Budidaya dan Ditjen Perikanan Tangkap. Sementara kami melihat juga di kedua Ditjen ini yang semestinya seharusnya ini bisa terserap dengan sangat maksimal, karena program-program di sini adalah program yang lekat dengan masyarakat kita, dengan nelayan kita, dengan apa istilahnya ya kalau perikanan budidaya mungkin nelayan tradisional Pak Menteri. Jadi ini perlu menjadi atensi kita bersama.

Tadi mendengar dari Fraksi Gerindra, dari Ibu Renny mengatakan bahwa tahun 2022 di pagu indikatif KKP meminta dukungan penambahan Rp8 triliun dan itu yang terbesar di Ditjen ini lagi. Nah, ini bagaimana ceritanya di tahun 2020 saja kita penyerapannya rendah sekali gimana mau bicara mau minta dukungan lagi terbesar di dua Ditjen ini. Nah, ini jadi pertanyaan juga ini polanya, prosedurnya seperti apa. Ini yang juga Fraksi NasDem juga ingin minta penjelasan dari Pak Menteri beserta jajaran dari Eselon I.

Kemudian berbicara rendahnya penyerapan anggaran di kedua Ditjen ini, kami mungkin memberikan saran, memberikan kritik juga yang sekiranya bisa membangun untuk KKP dan jajaran terkait regulasi mungkin Juknis atau syarat calon penerima bantuan dari KKP. Contoh kecil program bioflok, bioflok ini program yang sangat baik tapi di masyarakat Pak Menteri banyak kendala terkait persyaratan administrasi terutama untuk legalitasnya yang harus mencantumkan ada akte pendirian dan akte dari Kemenkumham. Yang Kemenkumham ini yang menjadi masalah untuk

masyarakat kita di Dapil, karena kita bicara Dapil, bicara daerah potensi keterbatasannya juga sangat luar biasa. Ini yang saya pikir perlu ada dirombak regulasinya supaya lebih mengena, supaya lebih memahami kondisi masyarakat kita di daerah.

Kemudian yang kedua, berbicara syarat untuk bioflok masih ini, ini hanya contoh yang kami sampaikan. Program bioflok ini sasarannya untuk lembaga pendidikan boleh, yayasan juga boleh. Nah, pertanyaan saya yang lucunya di sini untuk persyaratan yang lembaga Pendidikan. Contoh Pak Menteri, ketika saya mau mencoba menawarkan ini ke sekolah perikanan atau sekolah pertanian yang memang fokus untuk bergerak di sini itu salah satu syarat tidak boleh ada pengurus yang Pegawai Negeri Sipil yang ASN. Ini juga jadi masalah, bagaimana cerita sekolah SMA atau SMK Kejuruan yang memang notabene adalah negeri guru-gurunya tidak ada yang PNS, itu kan susah sekali dicari, bahkan mungkin berat. Nah, ini mungkin saya pikir salah satu kritik dari kami atau saran ke depan supaya regulasi ini bisa dimudahkan, bisa dirampingkan supaya bisa lebih cepat akselerasinya, cepat nyampainya ke masyarakat yang membutuhkan.

Kemudian yang kedua, di Rapat Kerja 31 Mei kemarin Komisi IV DPR RI juga tadi Pak Ketua Sudin sudah sampaikan bahwa meminta diperbanyak program-program penyuluhan Bimtek kepada nelayan atau nelayan tradisional kita. Dan di sini saya mencoba melihat beberapa bahan di setiap Ditjen itu belum menemukan yang secara spesifik, hanya beberapa Ditjen saja yang sudah ada. Saya tidak tahu apakah ini nomenklaturnya berbeda atau namanya yang berbeda tapi tujuannya sama untuk edukasi, pendampingan, penyuluhan kepada nelayan kita, nanti mohon diberikan penjelasan, karena kalau bicara Bimtek, bicara penyuluhan, pendampingan untuk calon penerima ini sangat penting.

Contoh Pak Menteri beserta jajaran, kita bicara bantuan benih ikan yang 1 juta ton tadi kata Pak Ketua, ini program yang sangat baik, program yang maksimal harusnya bisa dirasakan oleh masyarakat kita, tapi ketika bicara bantuan ini masyarakat nanya "dapat pakannya nggak Ibu, pakannya bagaimana?", ini yang jadi masalah besar. Semestinya ada Bimtek yang harus fokus ngurusin sistem keberlangsungan dari pakan ikan ini, karena nggak mungkin kan masyarakat kita, nelayan kita, nelayan tradisional, itu bergantung dari pakan bantuan dari Pemerintah saja sepanjang perjalanan pemeliharaan ikan mereka. Itu yang saya pikir sangat penting ada Bimtek ataupun misalnya video yang dibuat, digagas oleh KKP langsung dengan embel-embel dari KKP RI itu pasti nelayan kita, para petambak, mungkin para pemelihara ikan kita akan sangat antusias. Hadirkan di situ contoh membuat pakan yang baik, membuat pakan alami yang benar, itu sangat diharapkan oleh masyarakat kita. Ketika mungkin latihan secara tatap muka itu dinilai sangat terbatas, karena memang ruang dan gerak kita saat ini sangat terbatas.

Mungkin itu beberapa saran Pak Menteri dan jajaran dari Eselon I KKP dari Fraksi NasDem. Sekiranya nanti mungkin ada penguatan dari rekan Fraksi kami Pak Abdullah Tuasikal, mungkin nanti diberikan waktu Pak Ketua Dedi.

Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Budi ada yang mau dikomentari masalah bioflok.

F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik, terima kasih Pak Dedi.

Saya sedikit saja menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami Ibu Yessy Pak Menteri. Beberapa catatan kami sebenarnya dari Reses kami di Kalimantan Timur beberapa waktu lalu menggarisbawahi program bioflok. Program ini program sebenarnya sangat baik dan sudah beberapa tahun kami pantau turun di daerah-daerah dengan cukup baik. Tetapi catatan dari tahun 2020 kemarin dari sisi sarana prasarananya pembangunannya mungkin kurang baik. Mungkin kami minta Pak Menteri bisa menjadi perhatian juga Direktorat Jenderal Budidaya mungkin tata kelola dari proses pengadaan dan juga pelelangan harus lebih diperhatikan, karena dari beberapa lokasi turunnya bioflok di Kalimantan Timur yang kami lihat itu bangunannya tidak baik. Jadi ini ke depan mungkin bisa menjadi perhatian lagi.

Dan yang ingin saya soroti juga tadi mengenai ikan, ini jujur untuk Perikanan Budidaya ini harapan besar bagi kami Pak. Kami sangat apresiasi, sangat mendukung, bahwa ada terobosan, gagasan, dan juga ada keinginan atau penambahan anggaran. Sama dengan yang disoroti oleh Ibu Yessy tadi kami menyoroti dua Direktorat Jenderal, yaitu budidaya dan Perikanan Tangkap yang mungkin tahun 2020 kemarin realisasinya kurang baik. Ini untuk ke depan bisa menjadi catatan dan perhatian lebih lanjut Pak.

Saya kira demikian itu karena tadi Ibu Yessy bioflok saya teringat karena pantauan saat pada saat keliling di Dapil saya. Terima kasih atas perhatiannya Pak Menteri, saya ucapkan juga sukses semoga nanti penambahan anggarannya dan bisa direstui dan bisa kita jalankan bersama.

Terima kasih Pak Dedi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Kalau untuk anggaran sih saya sudah dengar kabar tahun depan itu Rp21 triliun tapi baru kabar, kabar baik apa benar apa nggak saya nggak tahu. Nah, yang selanjutnya ini juga lagi bahagia anaknya terpilih jadi bupati, habis itu Partai Demokrat Pimpinan AHY ini juga menang, ini kebahagiaan yang sempurna. Mudah-mudahan hari ini akan menyempurnakan kebahagiaannya dengan pertanyaan yang membahagiakan.

Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Pak Menteri bersama dengan Sekjen dan para Dirjen.

Evaluasi realisasi anggaran 2020 capaiannya 91,39% ini tersisa Pak Rp450 miliar nggak dibelanjakan dari Rp5,2 triliun. Saya menilai bahwa capaiannya rendah, orang-orang di KKP ini kurang pintar belanja. Kalau Rp450 miliar dibelikan kapal Pak, bisa 1.000 kapal untuk nelayan. Program 2021 realisasi saat ini 30,57% saya anggap lumayan Pak dengan bulan Mei dibandingkan dengan Kementerian yang lain saya kira ini rata-rata. Program 2021 ini telah tersosialisasi di Dapil Pak, dengan demikian jangan seperti 2020 banyak yang tidak terealisasi, maka kita juga yang kena getahnya.

2021 kemarin juga pada saat pembahasan sudah bagus hanya saja pada tengah jalan ada kebijakan refocusing. Refocusing juga ini yang bikin persoalan justru banyak program-program untuk masyarakat justru hilang pada saat refocusing. Namun, pada saat itu saya tidak berada di sini Pak, saya berada di arena gempa karena gempa pada saat itu saya punya daerah. *Alhamdulillah* semua bantuan turun semua ke daerah saya ke Sulawesi Barat dari mitra, bahkan dari Anggota Komisi IV DPR RI juga perorangan turun. *Alhamdulillah* bantuan dari KKP tidak ada Pak.

KETUA RAPAT:

Mungkin Bapak minta nyusul bantuannya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Tapi sudah selesai gempanya Pak.

Tentang ABT mangrove ya saya silakan saja Pak. Kemudian saya ingin bicara sedikit mengenai masalah laut sampai saat ini belum dijual garam kita masih impor, saya kira ini tidak bagus bagi Indonesia. Kita tahu bahwa memang ada kandungan-kandungan kimia dan perlakuan yang harus untuk bisa masuk garam industry. Tapi saya kira kan disinilah fungsi Litbang, sejauhmana Litbang mengimplementasikan atau menerapkan teknologi atau mencari teknologi baru sehingga petani garam kita ini bisa merekayasa sehingga kadar tertentu bisa dicapai untuk masuk di area industry. Atau memang garam impor lebih murah ketimbang dengan garam produksi dalam negeri, ini juga perlu kajian. Jangan sampai juga garam konsumsi itu juga diimpor karena akibat lebih murahnya impor ketimbang dengan hasil produksi kita. Kalau ini yang terjadi berarti petani kita perlu disupport untuk peningkatan produktifitasnya.

Untuk 2022 NTP nelayan itu ditariknya 103, 104, diharapkan ini bisa terlampaui karena ini adalah ukuran kesejahteraan bagi nelayan. Saya yakin bisa kalau benar-benar APBN ini fokus membantu dan meningkatkan produksi dan kesejahteraan nelayan. Tahun 2022 pagu indikatif Rp6,1 triliun saya kira tidak jauh berbeda dengan 2021 beda Rp500 miliar kira-kira atau sama daya serap ini yang dikasih ini.

Saya kira juga untuk usulan tambahan 2022 kita harus pahami bahwa kondisi keuangan negara kita keseimbangan primer saja kita minus 3%. Jadi usulan Rp triliun saya kira perlu kajian Komisi IV DPR RI, saya setuju tapi tidak akan mungkin kita

mengusulkan dikasih pagu indikatif 6,1 kemudian mau ditambah Rp8 triliun. Paling tinggi ya 50% dari pagu indikatif yang diberikan. Jadi saya minta Komisi IV DPR RI jangan ikut kita memermalukan Kemenkeu ya pagu indikatif 6,1 kita usulkan tambahan Rp8 triliun. Saya kira tidak akan dikasih saya kira itu, karena kemampuan keuangan negara kita sangat.

Dalam APBN dipatok pertumbuhan ekonomi 2022 5,2% sampai dengan 5,8%. Saya kira tantangan bagi Kementerian KKP untuk tumbuh lebih karena pendorong utama pertumbuhan ekonomi di era pandemi ini adalah pertanian dan KKP atau kelautan. Jadi kalau KKP bisa tumbuh 8%, 2022 ini kita capai 5,2% sampai dengan 5,1% kalau saat ini hanya tumbuh 1%. Saya kira menempatkan kita minus. Jadi dengan demikian APBN ini harus menjadi stimulan pendorong pertumbuhan. Dengan demikian perlu fokus pada produksi, sarana dan prasarana, termasuk alat tangkap, budidaya, dan distribusi.

Saya kira program tidak selamanya seragam, perlu kearifan lokal dan kultur tangkap dan budidaya di daerah disesuaikan, karena kalau tidak kita seragamkan ya memang persatuan Indonesia tapi dampaknya tidak selamanya kultur di Sumatera sama dengan kultur di Papua. Dan ini perlu kajian yang mendalam terhadap program-program agar tidak terjadi penyeragaman.

Table anggaran 2022 saya nilai tidak merata, tolonglah Pak Menteri ada wibawa dan peran Anggota Komisi IV DPR RI di Dapil. Malu kita kalau Anggota Komisi IV DPR RI satu pun programnya tidak ada di Dapilnya. Saya melihat ini kayaknya Sulawesi Barat keluar dari Indonesia, saya masih Indonesia saya kira Sulawesi Barat. Dengan demikian, tolong ini harga diri bagi Anggota Komisi IV DPR RI, ekspor ikan Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand, Philipina, ini akibat tarif yang tinggi yang dikenakan oleh negara-negara yang menerima dibanding dengan tarif Thailand dengan tarif Philipina dan Vietnam. Di mana diplomasi Kementerian KKP, Kemendag dan tentunya juga Menteri Luar Negeri. Ini perlu diplomasi sehingga kita jangan dihambat oleh tarif yang tinggi tidak adil bagi kita.

Hal-hal yang saya kritisi 2022 yang pertama adalah masih banyak program yang memakan anggaran yang cukup besar, seperti perencanaan, study, kajian yang tidak jelas tapi anggarannya besar. Yang kedua, shrimp estate 100 hektar, Rp250 miliar ini kayak food estate ini ada estatenya juga. Apa kegiatan ini, kepada siapa, manfaatnya apa, saya kira ini perlu penjelasan dari Pak Menteri menggunakan anggaran Rp250 miliar itu besar Pak, hanya 100 hektar apa disitu yang mau dibikin. Dukungan manajemen sangat tinggi dan belanja operasional 54% dari seluruh pagu yang ada. Harusnya ini bisa diturunkan minimal 54 untuk manfaat, gaji tidak seberapa.

Yang selanjutnya, kami pada hari ini kami menerima penjelasan dari Menteri terhadap pokok-pokok program 2022. Dan prinsipnya kami menerima penjelasan, Fraksi kami akan melakukan kajian untuk mengarahkan anggaran agar lebih fokus. Terhadap illegal fishing saya lebih cenderung memberdayakan nelayan, jangan berpikir tangkap terus nelayan asing. Kenapa selalu ada nelayan asing, karena nelayan kita tidak ada di sana. Coba kalau ada nelayan kita di sana nelayan asing juga akan berpikir untuk masuk, tapi kalau laut itu kosong ya maka nelayan asing akan menjadi objeknya, tapi kalau laut itu diramalkan oleh nelayan kita maka tentu nelayan kita akan berkelahi sendiri dengan nelayan asing. Tapi masalahnya kemampuan

nelayan kita untuk di zona ZEE tidak ada, ya persoalannya ya itu. Akhirnya kita hanya menjaga terus kita punya laut, sejauhmana kita punya kemampuan menjaga laut dengan luas ini tanpa bisa memberdayakan nelayan-nelayan kita yang memanfaatkan potensi ekonomi di zona ZEE. Yang demikian diperlukan kapal 100 GT kalau hanya program KKP ini hanya kapal 5 GT ya begitu-begitu saja jadinya.

Saya kira demikian Pak Menteri, terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih.

Khasnya Indonesia itu ada dialeg setiap daerah sangat berbeda-beda, dialeg dari Makassar, Sulawesi. Dialegnya seperti itu dan sekarang ustadnya lagi terkenal sekarang Ustad Youtube.

Dan selanjutnya kalau ini beda lagi ini lama tinggal di Jawa Barat nyalon di Sulawesi Selatan karena orang tuanya dari Sulawesi Selatan, rezekinya terus mengalir tidak pernah berhenti, berbagai hal dihadapi, malah naik jabatan. Jarang orang yang bernasib seperti ini, dan biasanya kalau pertanyaannya kritis banget, panjang, tajam, menukik. Mudah-mudahan hari ini yang panjangnya tinggal yang pendeknya, yang menukiknya tinggal yang landainya, yang ada cuma senyumannya.

Silakan Ibu Riezky Aprilia, ya kan Ibu yang mau nanya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Saya Sumsel Pak, Sumatera jangan dipindah ke Sulawesi Pak, makanya tadi saya nggak ngeh. Tapi sudah tahu kayaknya bakalan agak panjang, mohon ijin Pimpinan dan rekan-rekan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Saya menerima bahan rapat ini pada tanggal 3 Juni dan lumayan saya belajar tentang jenis-jenis ikan dan segala macam di dalam aneka kemaritiman dan lautnya. Pertama, terkait tadi mungkin realisasi sudah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian, semua sudah menyampaikan. Saya rasa realisasi ini mungkin yang menjadi pertanyaannya sama, ada hal-hal yang belum dimaksimalkan yang seharusnya tahun ini dijawab pada saat terakhir itu sudah disampaikan, tapi belum nyampe katanya barangnya karena sesuatu kendala teknis mekanisme administrasi.

Kemudian kita masuk ke bahan, tapi saya mengkritisi yang menjawab pertanyaan secara tertulis di dalam RDP tanggal 31 Mei. Ada pertanyaan saya, saya mempertanyakan *broodstock* itu di Musi Rawas Sumatera Selatan bukan Sumatera Barat, mungkin petanya kurang benar coba digeser Musi rawas itu Sumatera Selatan

bukan Sumatera Barat. Tolong yang menjawab pertanyaan itu. Kemudian coba diperhatikan antara yang ditanya sama yang menjawab itu Jaka Sembung, jadi nggak nyambung sama sekali. Oke, ini kritisi saya Pak Menteri, jadi jangan dipikir kita nggak baca bahan dan jawaban, saya baca semuanya, lumayan nambah ilmu.

Pertama di halaman 14, halaman 14 itu Dirjen PT, mager project RPJMN 2020-2024. Menjadi pertanyaan saya ada 2A dan B, mager project-nya yang mana, karena mager project itu berarti *priority project*, jadi jangan sampai gagal fokus. Sudah banyak ini mitra kita yang gagal fokus jangan diikuti Pak Menteri ya.

Kemudian karena saya ingat juga saya mempertanyakan masih di halaman 14 itu nomor 4 poin E, karena saya ingat tahun lalu saya yang tanya menteri lama Menteri, menteri baru saya tanya. Berdasarkan surat yang diberikan juga oleh Kementerian KP, saya waktu itu di rapat ruang Banggar meminta karena bahasanya di sini loan, saya nanya waktu itu 4 lokasi kenapa jadi 3 lokasi. Saya ingat waktu itu 4 lokasi kenapa jadi 3 lokasi di situ, mohon penjelasannya.

Kemudian, nggak apa-apa ya panjang dikit teman-teman maaf ya, dari tanggal 3 bacanya loh. Kemudian juga halaman 14, kan lokasinya itu kalau nggak salah disebut a, b, c, yang tadi 4 tadi. Saya support-support saja tapi tolong kenapa 4 jadi 3, terus analisisnya, dampak lingkungannya, urgensinya aya yakin Pak Menteri kan paham lah pengusaha mungkin bagaimana membangun hal-hal tersebut harus ada *requirement-requirement* yang memang harus jangan sampai menjadi *impact* di kemudian hari.

Kemudian masih Dirjen PT di halaman 15, identifikasi dan perencanaan tadi sudah disampaikan peningkatan operasional. Ini apa ini *feasibility study* atau apa ini, karena 22 lokasi 34 provinsi peningkatan operasional pelabuhan perikanan 34 provinsi, anggaran 29,5 untuk tahun 2022 di mana itu Dirjen PT. PT ini siapa ya? Oh Pak Zaini, kan Bapak tahu 34 provinsi Sumsel katanya nggak ada laut, jadi di mana itu port-nya.

Kemudian sekarang masuk ke Dirjen PB, ijin PB siapa PLT-nya Pak? Oh, sudah definitive ya, Pak TB ya, PB masih PLT-nya Pak Menteri ya, oke. Saya mau tanya PB fokus komoditasnya apa, menindaklanjuti tadi yang disampaikan oleh Pak Suhardi Duka terkait shrimp estate, kluster estate, ini kluster apa ini, tambak udang milenial shrimp farming. Gini Pak, kawasan setra produksi pangan kalau dipertanian itu kita sepakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Saya mau nanya pembangunan ini dasar hukumnya apa, dasar berpijak Bapak apa. Jangan sampai gara-gara KSPP, saya nggak mau nyebut food estate, orang kenalnya food estate, tapi saya nggak mau nyebut food estate karena nggak ada payung hukumnya. Saya mau tanya estate-nya Bapak ini base on what witch regulation, apakah itu pangan, apakah itu apa, mohon penjelasannya karena kami nggak mau, karena kita mitra loh Pak, kita pengen Bapak berhasil, Bapak berhasil kita juga sukses berarti.

Nah, reagasinya shrimp estate ini apa? Karena pada saat rapat tahun lalu kalau nggak salah 6 Juni 2020, Bapak sudah membuka peta Pak, dan saya masih simpan itu di 6 unit Pak, nanti Bapak boleh cek sama staf Bapak pemetaan terkait tambak-tambak ini, klusterisasi. Klusternya ini apakah sudah memenuhi kordinat

kualitas air dan lain-lain, kita bukan nggak support, kita support. Tadi Ibu Yessy menyampaikan permasalahan budidaya itu pakan, pakannya mahal. Sekarang kita bagaimana juga meminta pakannya murah, kan gitu Pak supaya project Bapak berhasil. *Let's learn from the past* kita punya food estate yang tingkat kegagalannya juga belum terukur karena tidak ada indikator.

Nah, kemudian ini juga Bapak tadi Ibu Alien menyampaikan masalah konservasi jangan sampai masalah shrimp estate ini menjadi berbenturan dengan KLHK, karena apa? Amdalnya bagaimana Pak, kalau mau dibikin skala besar, kan begitu, karena ada limbah, ada apa, dan lain-lain. Nah, kemudian saya mau tanya di halaman 17. Di halaman 17 masih Ditjen PB, saya mau tanya point 7 terakhir usulan rencana penarikan *infrastructure improvement for shrimp aquaculture project*, PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri). Saya mau tanya ini persiapan kah atau sudah disepakati. Tolong itu nanti dijawab naik ke atasnya dipoint 5 broodstock ada lagi muncul satu unit, itu di mana. Karena *broodstock* yang di Musi Rawas yang sudah berabad-abad pun belum ada realisasinya.

Jadi mungkin sementara juga itu dulu ya, saya kemarin telepon Bapak BPRSDM minta terkait jawaban WPP. Saya support Pak Menteri, WPP Bapak ada 11 coba diminta BPRSDM coba berapa stok ikan supaya Bapak juga bisa fokus di 11 WPP tersebut. Karena anggaran inikan belum tentu di-approve Pak, so dengan angka yang kecil ini bagaimana *low budget high impact*. Nah, kalau memang shrimp estate ini bisa cuma bisa sekedar revitalisasi dengan yang eksisting *why should you* bikin yang baru. Karena renovasi itu akan lebih murah daripada membangun yang baru.

Terakhir saya mau tanya PBS, PBS ini kayaknya perlu dihitung ulang. Kayaknya banyak yang nomenklaturnya sama, nomenklaturnya sama cuma beda judul. Ini sudah cukup di mitra-mitra yang lain ilmu kayak begini sudah cukup, namanya apa, dipindah-pindahin, karena saya sudah sisir, mana Dirjennya? Ibu, oke. Ibu ya, nomenklatur saya sudah hitung ini sudah berapa kira-kira bisa direalokasi dan saya minta di forum yang terhormat ini di kesimpulan rapat nanti ini penting juga kita dorong supaya mereka bisa fokus bekerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan di kemudian hari.

Demikian Pimpinan, sementara ini saya akhiri.

*Billahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih Mbak Luluk.

Sekarang belum Mbak Luluknya, terima kasih Mbak Luluk persiapan untuk menyampaikan pandangannya.

Silakan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri yang saya hormati dan juga para pejabat Eselon I yang hadir, Bapak dan Ibu semuanya Anggota Komisi IV DPR RI yang berbahagia.

Yang pertama, pertanyaan saya mewakili teman-teman juga di Fraksi PKB Pak Menteri, tentu kita ingin *update* yang terkait dengan pajak atau PNPB yang dulu pernah ditargetkan. Dulu targetnya memang sangat ambisius dan kita memang sangat mendukung sebenarnya karena itu yang seharusnya dilakukan oleh KKP jauh-jauh hari. Hanya saja kita ingin seperti apa beritanya hari ini, apakah Bapak bahagia dengan target itu dan capaiannya seperti apa.

Nah, yang kedua yang terkait dengan usulan penambahan anggaran. Bagi Fraksi PKB Pak Menteri, sangat mudah lah bagi kita untuk memberikan dukungan peningkatan anggaran KKP karena terus terang saja kita punya hubungan emosional dengan KKP, karena ini muncul dari era Gus Dur. Dan kita juga khawatir sekaligus prihatin karena selama 5 tahun terakhir evaluasi kita, anggaran KKP inikan terus menurun. Nah, jika anggaran ini terlalu kecil kita sebenarnya ingin menjaga Pemerintah jangan sampai kemudian rakyat itu punya anggapan ini Pemerintah enggak serius ya untuk meningkatkan semua upaya untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan, kesejahteraan, apalagi kemakmuran nelayan.

Kita juga masih sangat punya catatan yang sangat serius yang terkait dengan pembudidaya ikan apalagi nasib para petambak garam, belum lagi garamnya sendiri yang terus impor, kemudian belum lagi soal para pengelola, pemasaran ikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, penambahan anggaran ini memang sangat *make sense*, hanya saja tolong kita dibantu untuk mendapatkan satu gambaran yang sangat jelas prioritas yang memang benar-benar akan dilakukan oleh Kementerian KKP dengan penambahan anggaran itu. Jangan sampai kemudian ini menjadi sekedar katakanlah kayak *business as usual*. Jadi anggaran nambah tetapi sesungguhnya nggak kelihatan juga *output* yang akan kita hasilkan dari adanya penambahan itu. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Oleh karenanya kita ingin ada nggak sih dengan tambahan anggaran yang sangat besar tetapi juga sekaligus kita ini bisa melihat prioritas-prioritas yang kaitannya dengan upaya kita tadi Pak, Mulai dari nelayan kita bisa lebih sejahtera, kemudian soal budidaya itu bisa bergairah kembali, sarpras-sarprasnya itu kemudian bisa meningkat, ketergantungan impor garam itu misalnya bisa dikurangi, termasuk kemampuan kita untuk bisa menghasilkan garam industri itu juga bisa membanggakan. Hal-hal seperti itu yang ingin kita lihat.

Kemudian kita juga ingin apa namanya keyakinan dari Pak Menteri, karena serapan anggaran yang baru 30% walaupun tadi sudah dinilai cukup bagus, tetapi menurut saya 30% inikan mestinya bisa ditingkatkan. Nah, kalau ada tambahan anggaran bagaimana ini bisa diyakinkan dengan kita kemampuan untuk akan menyerap anggaran yang lebih besar lagi. Nah, yang selanjutnya yang terkait dengan perbaikan tata kelola perikanan budidaya Bapak. Ini tolong benar-benar menjadi perhatian karena budidaya ini melibatkan para pelaku terutama masyarakat kecil yang saya pikirkan adalah para pelaku masyarakat kecil. Mereka ini punya kegairahan Bapak untuk bisa mendukung agar produksi perikanan khususnya budidaya itu bisa meningkat, kemudian konsumsi makanan sehat itu juga bisa dicapai, belum lagi kesehatan masyarakat itu benar-benar bisa diwujudkan melalui adanya peningkatan budidaya perikanan ini. Tetapi bawah ini nggak bisa dilepaskan dari adanya biaya produksi yang sangat mahal yang itu ditentukan oleh harga pakan yang sangat tinggi,

karena apa? Karena ini impor. Inikan ironis sebenarnya, bagaimana kita bisa membantu mereka bisa lebih sejahtera dan produksi ini meningkat tetapi kita abai dengan salah satu faktor penting dari produksi, yaitu pakan.

Nah, ada nggak kemudian peta jalan yang Bapak akan dilakukan termasuk dengan misalnya peningkatan anggaran itu untuk benar-benar memfokuskan ada teknologi pakan mandiri yang memang bisa kita lakukan. Cara-cara lain apakah ada bahan-bahan yang sebenarnya mungkin cukup melimpah yang kita miliki, yang itu juga cukup bagus untuk perikanan budidaya. Bahkan saya dengar misalnya ada beberapa negara Eropa yang mereka itu impor bungkil sawit Bapak, dipakai untuk apa? Untuk bahan pakan, baik itu ternak ataupun ikan, lalu mereka kemudian ekspor dan kita membelinya dalam bentuk pakan jadi. Ini kan sedih banget gitu, sementara kita ini melimpah dengan sawit-sawit kita dan catatannya ekspornya itu sangat tinggi dari sawit, tetapi ada karena apa? kelanjutannya ini justru dinikmati oleh pihak lain. Nah, ini *monggo* dipikirkan sangat serius dengan memanfaatkan sumber-sumber yang kita punya termasuk pakan yang nabati yang ini pelan-pelan akan bisa mengurangi ketergantungan kita dari impor. Karena dengan begitu kita bisa menghemat yang 70% dari kebutuhan produksi itu yang sebenarnya nggak perlu untuk kita harus datangkan dari impor, gitu ya Pak ya.

Nah, yang berikutnya yang terkait dengan maraknya *illegal fishing* ya Pak. Mungkin Bapak sudah punya laporan juga dari organisasi-organisasi yang memang sangat konsen dengan isu perikanan kita. Jadi selama masa pandemi mulai dari Februari bahkan sampai April ternyata ini *illegal fishing* ini juga tidak berkurang juga gitu loh. Jadi ternyata apakah mereka memanfaatkan kelengahan kita, karena selama masa pandemi jadi banyak hal yang kemudian mengalami penyesuaian, apakah itu kerja dan lain sebagainya, sehingga *illegal fishing* ini juga juga terus-terusan terjadi. Nah, kita ingin apakah nanti penambahan anggaran kalau memang disepakati itu juga akan digunakan untuk memperkuat kemampuan kita dalam hal menjaga wilayah kedaulatan ekonomi ataupun perikanan dan perairan kita. Karena ini yang menjadi *core*-nya KKP.

Jangan sampai kemudian tetangga sebelah memanfaatkan posisi kita dalam melakukan pengawasan dan penindakan dengan mencoba menarik ke satu lembaga tertentu itu, seperti yang mungkin Bapak ketahui sehingga fungsi-fungsi pengawasan KP itu justru diambil dari KKP dan itu tidak kita inginkan. Nah, segenap niatan kita untuk memenuhi cara kerja kita termasuk mungkin alat-alat kerja kita, teknologi yang diinginkan agar Bapak bisa bekerja maksimal. Ini yang mungkin perlu dikeluarkan di dalam rencana anggaran berikutnya. Nah, ini bisa dikasih ke kita. Jadi kita cukup *confident* bahwa laut kita aman, perikanan kita aman, karena kemampuan kerja KKP untuk menjaga ini semuanya.

Nah, yang berikutnya mungkin masih juga menambah yang terkait dengan garam, walaupun di sini tidak ada Direktur Garam karena belum waktunya. Tetapi dengan kebutuhan garam yang 4,5 juta ton di mana 88% merupakan garam industri, saya ingin menayakan kepada KKP juga sampai di mana sih kemampuan kita untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan garam industri. Karena selama ini yang dijadikan dalih untuk importasi garam yang jutaan ton itu karena adanya kebutuhan garam industri yang nggak bisa dipenuhi dalam negeri, masa iya sih itu loh. Inikan pertanyaan sederhana dari orang yang awam, dengan perikanan kita yang 2/3 dunia

ini masa Indonesia tidak bisa menghasilkan garam industri yang dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Ini kita nggak mampu atau kita nggak mau.

Nah, inikan terkait dengan *political will* ya Bapak ya. Nah, kita berharap sebenarnya hambatan apa sih yang paling terbesar kita ini punya daulat garam sehingga industri kita ini bisa tumbuh, garam kita ini juga bisa daulat dan pada akhirnya petambak garam kita juga bisa sejahtera. Nah, inikan ada satu sistem yang saling terkait, tapi kalau kemudian kita hanya terus menyerah hanya karena dianggap nggak mampu, kok saya jadi sedih juga masa iya sih negeri ini nggak punya kemampuan untuk memproduksi garam yang NaCl-nya memenuhi kebutuhan industri.

Nah, saya kira yang terakhir Bapak Menteri karena ini juga titipan dari teman-teman hendaknya prioritas ke depan kita arahkan betul untuk pemberdayaan ya. Jadi pemberdayaan mulai dari budidaya perikanan terutama perikanan darat, terutama ini Dapil-dapil yang nggak punya laut Pak Menteri, jadi tolong jangan di anak tirikan. Kayak Dapil saya inikan lautnya sudah kecil, Wonogiri laut selatan pula yang sekarang mau kena ancaman potensi Tsunami. Tetapi nelayan-nelayan yang sebenarnya terhimpun di sekitaran sana kan juga banyak terutama juga daerah-daerah lain yang sebenarnya bagus secara budidaya perikanan tetapi karena fokus kita belum ke sana jadi tidak tampak.

Saya kira itu yang jawaban tertulisnya kayaknya ada juga yang belum masuk ya, nanti mohon untuk dilengkapi, dicek lagi Pak, pertanyaan Anggota itu biar nggak kayak peristiwanya Ibu Kiki karena saya juga melihat yang sama.

Terima kasih.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Luluk, ya memang fokus kita tentang laut itu yang pertama masih adanya illegal fishing. Yang keduanya, masih adanya para nelayan kita menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk melakukan penangkapan ikan. Yang ketiganya, semakin rusaknya ekosistem laut, penambangan, dan berbagai aktifitas lainnya yang berhubungan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang keempatnya adalah plastik, sekarang menjadi ancaman lagi bagi laut karena mengalir deras di berbagai sungai. Dan setiap orang yang pergi ke laut pun membawa plastik ini menjadi problem tersendiri bagi masa depan laut kita. Tentunya ini tidak bisa hanya diselesaikan di meja harus ada upaya komprehensif kita. Di tambah lagi yang kelima, rusaknya bibir pantai akibat berbagai aktifitas kegiatan kehidupan yang terjadi di berbagai daerah termasuk semakin rusaknya mangrove. Ini fokus yang harus menjadi perhatian dari Bapak Menteri dan jajarannya agar komitmen pembangunan berkelanjutan terus menjadi kenyataan.

Dan selanjutnya ini yang terakhir dari Ibu kita yang lembut, tenang, kemudian selalu suaranya tidak meledak-meledak tapi tenang sampai bikin orang tertidur mendengarkannya kalau lama-lama. Terima kasih Ibu Ema, dipersilakan.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,
Bapak Menteri beserta jajaran yang juga kami hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, karena pertanyaan kami dan masukan-masukan ini adalah yang terakhir di antara seluruh Fraksi. Mungkin tinggal melengkapi dan penegasan saja yang isinya hampir sama. Yang pertama, terkait adanya usulan penambahan anggaran KKP di tahun 2022 sebesar Rp8 triliun, semula Rp6,1 triliun menjadi Rp14,1 triliun. Kami memerlukan penjelasan kegiatan skala prioritas yang akan dilaksanakan. APBN menjadi instrument utama dalam penanganan dampak covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kami meminta kegiatan Pemerintah diprioritaskan pada percepatan pemulihan ekonomi akibat covid-19 dan penguatan pemberdayaan masyarakat. Kami mendorong program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ditingkatkan.

Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya dengan memperluas program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu terutama untuk sosialisasi, bimbingan teknis, gemar ikan, yang mana memang itu yang sangat-sangat efektif yang ada di masyarakat memang masyarakat memerlukan itu. Terkait yang disampaikan dengan penambahan anggaran sebesar Rp8 triliun ini bentuk ikhtiar dari Bapak Menteri beserta jajaran bagaimana ke depan KKP bisa lebih baik dalam penyerapan program dan program-program kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan baik pula, terutama dalam penyelesaian solusi terkait dengan garam. Ini kami berharap dari anggaran tersebut kesejahteraan petani garam juga akan bisa terpikirkan dengan penambahan anggaran tersebut.

Terakhir sekali lagi Pak Menteri, mohon Dapil kami yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Luluk memang tidak ada laut. Karena kemarin kita untuk program bioflok, gemar ikan, yang seharusnya kami ini ada kompensasi untuk ada penambahan titik ternyata realisasinya kita tetap sama dengan teman-teman yang mempunyai laut, sehingga belum maksimal di Dapil kami. Ini kami juga akan menyuarakan dari Kapoksi Fraksi PKB juga sama satu Dapil dengan saya. Jadi mohon juga ada perhatian lebih juga Pak Mindo, jadi ada perhatian yang lebih daripada teman-teman yang mempunyai laut, mempunyai nelayan. Kami ini juga mempunyai pembudidaya ikan, juga masyarakat kita yang tidak terbiasa makan ikan. Untuk itu gemar ikan juga perlu untuk ditambah.

Terima kasih itu Pak Menteri beserta jajaran.

Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan.

*Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Ema.

Ini pertanyaan terakhir sekaligus juga ngingetin agar Dirjen Pesisir atau Dirjen Perikanan Tangkap, perahu yang di Pangandaran yang dulu dapat sitaan illegal fishing yang sekarang sudah terbalik. Saya minta untuk ditarik ke pinggir dibuat untuk tempat wisata atau museum karena kunjungannya sangat tinggi di sana. Sekarang semakin tenggelam soalnya perahu, sayang itu kalau tidak ditarik. Dan kalau ditarik biayanya sekitar Rp500 juta, mohon ke depan untuk diprogramkan.

Selanjutnya tawaran saja.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, saya menawarkan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Saya Pimpinan, sebentar saja, saya biasanya sebentar.
Lagi menikmati di sini sama Adinda Yessy.

Baik Bapak Menteri dan semuanya Bapak-Ibu sekalian, Pimpinan dan semuanya.

Saya tadi Pak Ketua, Pak Sudin di awal sudah memberikan penekanan tentang ikan hias. Jadi sebenarnya Indonesia ini punya potensi yang luar biasa untuk ikan hias, cuma kan karena belum terekspose secara maksimal kemudian tidak sampai keluar negeri. Beberapa kegiatan ekspose atau pameran ikan hias itu ada di Tiongkok dan Indonesia tidak dilibatkan didalamnya. Itu sebenarnya ada kekhawatiran Indonesia mampu untuk merebut pasar itu, sebenarnya Indonesia bisa menggantikan itu. Nah, kita punya potensi yang besar, kita punya potensi yang luar biasa juga maka perlu juga kita punya atensi untuk itu Pak Menteri.

Di tempat saya ini tidak hanya di tempat saya kebetulan di Blitar itukan Koi, Koki, lalu Cupang itukan luar biasa gede-gede, di sana pusat. Nah, perlu perhatian, perlu penanganan yang lebih maksimal tidak hanya misalnya tadi kalau yang Pak Ketua, Pak Sudin mengkritisi tentang yang ada di ember bagaimana lebih gede lagi. Kalau di Blitar itu yang namanya Koi itu hampir satu kampung dan mereka Koi-nya keren-keren, makanya memang iya dan itu potensi untuk diekspor juga. Jadi silakan Bapak Menteri untuk hadir di Blitar untuk lihat itu.

Yang kedua, ini tentang mangrove. Bisa untuk kali ini untuk mungkin di tahun 2022, inikan kalau kita bicara tentang mangrove itukan hampir 3 kementerian mengola mangrove ini ya. Nah, pemberdayaan tadi juga sempat saya dengar dari beberapa teman-teman juga sudah menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat untuk menjaga mangrove ini yang paling penting. Karena masyarakat itu selalu ada di samping mangrove atau lokasi itu dan mereka harus dikasih kesempatan, dikasih keterampilan, dikasih wawasan, dikasih kesadaran, supaya mereka tetap menjaga. Hari Jumat yang lalu kita ke Banten ya, dan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, komonitas-komonitas itu luar biasa. Tugas kita adalah bagaimana kita

menumbuhkembangkan kelompok masyarakat ini sehingga memang benar-benar mereka menjaga mangrove itu dengan sebaik-baiknya.

Itu saja, terima kasih Kang Dedi.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kalau persoalan Koi Blitar di rumah saya penuh itu Koi-nya dari Blitar semua. Dan bisa ngomong bahasa Jawa Koi saya itu, karena dari Blitar. Kemudian kemarin kita Komisi IV DPR RI juga kunjungan ke Politehnik, saya pikir Politehnik harus terus didorong dan dikembangkan diposting di berbagai media sosial agar anak-anak Indonesia mulai belajar tentang kelautan. Kemudian di situ ada beberapa *recommended* yang perlu kita tekankan. Yang pertama adalah pemeliharaan seluruh infrastruktur bangunan yang belum terkelola dengan baik, mudah-mudahan mungkin juga karena pembiayaan. Yang keduanya juga bangunan-bangunan harus segera ditata secara artistik sehingga pusat-pusat Pendidikan kelautan dan itu menjadi pusat pariwisata, itu yang ingin menjadi fokus kita. Karena luas, kolamnya ada, bangunan-bangunannya sangat luas terbentang, siswanya ada, itu kalau didorong menjadi Pendidikan atau eduwisata, Pendidikan yang berbasis pariwisata itu sangat luar biasa, karena ini sangat penting bagi kehidupan kita.

Dan selanjutnya kita sekarang ingin tawarkan, kalau saya sih bukan nawarin tapi ngajak saja, daripada kita istirahat lebih baik kita beresin sampai pukul 13,30 WIB, setuju nggak? Biar kita masih bisa Dzuhur langsung bisa selesai acaranya. Setuju? Oke, kita lanjutkan.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya saya persilakan Pak Menteri untuk memberikan jawaban.
Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Sebelumnya saya mohon maaf nanti jam 14.00 WIB itu dipanggil Presiden, jadi kalau seandainya bisa diselesaikan sampai jam 13.00 WIB saya akan sangat berterima kasih.

KETUA RAPAT:

Kita beresin sampai jam 13.30 WIB.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Terima kasih Pak.

Mungkin nanti secara gamblang seluruh dari pertanyaan yang saya hormati seluruh Anggota Dewan akan kami kirimkan secara tertulis. Namun, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi konsen. Yang pertama adalah kami setuju tentu masukan

dari Bapak Ketua yang sudah meninggalkan ruangan ini karena ada kesibukan lain di luar. Terhadap bimbingan teknis di setiap Eselon I kepada masyarakat. Saya kira kita setuju soal itu dan itu mungkin saya pikir perlu ada satu *turning up* atau kita bisa duduk secara bersama. Karena saya meyakini bahwa apa yang kita kerjakan ini sama yang dipikirkan oleh seluruh Anggota Dewan, yaitu untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Tadi saya juga sangat *appreciate* dengan apa yang disampaikan oleh Ibu.

KETUA RAPAT:

Bapak kan ingin cepat Pak, karena ingin cepat Bapak jawab sampai jam 12.20 WIB habis itu saya kasih kesempatan pendalaman 10 menit habis itu Bapak jawab lagi. Setelah itu Bapak boleh meninggalkan tempat ini.

Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Baik, terima kasih Pimpinan.

Saya sangat apresiasi terhadap Ibu Aprilia, Ibu Kiki ya yang begitu detail. Jadi saya kira kita memiliki satu anggaran belanja yang minim, sekaligus menjawab tadi dari Bapak Demokrat. Jumlah tenaga kerja kita itu ada 13 ribu kurang lebih ditambah lagi dengan tenaga honorer jadi total kira-kira 20 ribu. Mereka itu sudah tunjangan kinerjanya kecil lalu kemudian kalau kita misalnya kecilin lagi saya sudah nggak tega, terus terang saja di situ. Nah, lalu kemudian program yang kecil itu bagaimana kita bisa memenuhi Ibu. Satu hal yang saya pikirkan, karena tadi Ibu menyebut saya menjadi bagian dari pernah sebagai pengusaha sekarang sudah nggak bisa lagi pengusaha Ibu, karena saya total mengabdikan diri di sini sama seperti Ibu.

Jadi begitu besar Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, lalu kemudian kalau kita mau kerjakan semua nggak akan pernah bisa kita kerjakan dengan anggaran yang begitu kecil. Tetapi kemudian usulan supaya kita sudah bagaimana kalau anggaran yang 5 tahun yang lalu pernah kita mencapai di atas Rp10 triliun. Lalu saya sampaikan boleh nggak itu saya minta kembali, saya sampaikan juga bahwa banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang dangkal bahkan saya waktu itu satu minggu sebelum lebaran saya mendampingi Bapak Presiden ke Lamongan yang kebetulan sudah saya datangi dulu dan dangkal. Dan kemudian harapan dari para nelayan di sana Pak, "kami tidak bisa melabuh sulit sekali kami melabuh karena dangkal", beliau juga tahu itu dangkal dan dangkal itu bukan hanya di Lamongan hampir seluruh. Dan ini selama 6 tahun kurang lebih tidak ada perbaikan di pelabuhan. Kalau Bapak dan Ibu misalnya pergi lagi ke daerah misalnya di daerah Pantura waduh baunya minta ampun tapi saya datang, biar pun bau saya datang, karean saya ingin tahu seperti itu apa yang harus dilakukan.

Lalu saya berpikir kenapa Pemerintah juga tidak bisa memberikan anggaran yang seharusnya kepada kita. Karena memang situasi keuangan negara kita memang juga kita membutuhkan inovasi dari seluruh kementerian yang ada. Nah, saya mencoba dengan cara dan pengalaman saya, ini saya mau share sedikit Ibu. Saya kemarin pergi sebelumnya pergi ke Jawa Timur, mohon maaf Ibu Wakil Ketua saya nggak ke Blitar karena sudah waktunya tidak nggak cukup lagi kesana, sudah teler. Tapi ada satu kabupaten yang kalau menurut saya itu sangat bagus itu Blitar di Gresik.

Di Gresik itu produksi bandengnya itu 80 ribu ton setahun, itu kalau saya tebak, saya bilang "kalau 80 ribu ton itu kira-kira duit yang beredar di Kabupaten ini adalah Rp1,6 triliun, betul angkanya ada. Jadi kepala dinasnya saya panggil dan saya minta data-datanya, kira-kira seperti itu. Lalu saya tangkap satu, bagaimana ini saya bisa jadikan model. Lalu nggak sempat pergi lagi karena kemudian kita harus benahin di internal ada Permen-permen dari Undang-Undang CK yang harus kita selesaikan, kita harus monitor kembali, dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya kumpulkan Eselon I, Eselon II, kita kerjakan bersama.

Kemarin saya dengan Bapak Hermanto, oh tidak ada beliau. Saya pergi ke Sumatera Barat, saya tempuh ada satu daerah Pasaman namanya perbatasan dengan Mandailing Natal di situ, sawahnya itu berubah Bapak dan Ibu, sawahnya berubah menjadi kolam-kolam. Dan itu produksi emasnya kira-kira sekitar, ikan emasnya produksi setahun 54 ribu ton. Itu nilai transaksinya di situ setiap tahun itu Rp1,3 triliun. Nah, ini model yang kedua. Jadi itu darat itu tidak ada lautnya, dia benar-benar darat di situ. Jadi memang Bapak dan Ibu, saya memang tidak bisa dengan anggaran yang ada, kira-kira cuma selisih Rp3 triliun kurang lebih atau Rp3,5 triliun 2022 nanti. Saya bilang harus ada satu model yang kita buat karena waktu saya dan waktu Ibu ini mungkin cuma mungkin sampai 2024 dalam arti masa Pemerintahan 2024 setelah itu kalau Ibu mencalon lagi Insya Allah duduk lagi tapi belum tentu juga di Komisi IV DPR RI.

Tapi satu hal yang ingin saya lakukan adalah bagaimana kita membangun yang namanya satu wilayah. Contoh misalnya udang ini unlimited di mana, jadi pertama kali saya datang saya lihat adalah pasar, pasar perikanan itu berapa sih besarnya di seluruh dunia, 162 miliar Dolar. Ini mah saya kalau sebagai pedagang ini gedanya luar biasa. Terus kemudian ada spot-spot seperti kemarin saya di daerah 50 kota lihat satu kali yang dijaga oleh seluruh warga di situ kalau mereka mengambil ikan namanya ikan dewa itu dikutuk oleh masyarakat. Kalau ada yang meninggal nggak didatangi, kalau pesta nikah nggak didatangi, itu terjaga dengan baik dan ikan itu makannya buah-buahan. Jadi ikan dewa namanya, ikan semah disitu, dan ikan itu harganya sangat mahal, kira-kira sekitar Rp2 juta sampai Rp3 juta konon di Malaysia saya dengar saya belum pastikan tapi saya tanya di Malaysia itu bisa sampai Rp5 juta. Tapi saya pikir inikan saya ini masih dalam konteks, jadi pikiran saya adalah ini masih dalam konteks konsumsi. Lalu bagaimana dalam konteks misalnya dia untuk menjadi bagian dari farmasi, kenapa blackmore itu nilainya miliaran Dolar dan itu sumber bahan bakunya itu banyak juga dari sektor kelautan dan perikanan untuk kesehatan manusia. Nah, kita belum ekspor sama sejauh sana.

Saya *challenge* juga Kepala Badan Riset kita, tapi begitu saya tengok lagi anggarannya kecil Ibu, kecil banget anggarannya. Bagaimana saya ketemu sama seluruh professor yang ada di KKP, ternyata KKP itu ada professor 30 orang saya jumpa sama beliau-beliau itu luar biasa, ya tapi anggarannya tidak ada. Saya lagi mikir ini, kalau misalnya anu pribadi ini kita urus jadi bisnis yang sangat besar itu misalnya. Jadi saya kira sekali lagi, inovasi yang saya lakukan yang namanya estate tadi Ibu, saya mohon dukungan. Saya sampaikan estate itu adalah pengelolaan dengan cara benar apalagi sekarang sudah ramai di internasional bahwa kita harus menuju kepada ekonomi biru. Ekonomi biru itu harus mikir setiap uang 1 kg itu harus menghabiskan berapa kilo tepung ikan. Di mana tepung ikan juga diambil dari laut dan ini secara siklus nggak bagus akan menghancurkan sisi yang lain. Nah, ini yang sedang kita

pikirkan, kita membangun satu estate yang didalamnya itu masyarakat. Jadi kalau misalnya, jadi ada dua, yang pertama adalah didalamnya masyarakat kita sebutnya sebagai evaluasi dan revitalisasi seluruh petambak di Indonesia. Karena tambak di Indonesia ini nggak tahu tapi yang pasti asal terjadi saja di mana-mana.

Dan ini kadang-kadang kemarin saya waktu di Padang itu ada ketemu satu dosen professor kebetulan sesama alumni, mengatakan bahwa bagaimana kita rebutan ruang untuk nanam mangrove dan tambak. Sisi lain di situ ekonomi, sisi lain di situ adalah lingkungan. Wah ini pertanyaannya sangat menarik saya sudah juga menjawabnya. Jadi saya katakan saya pulang dari sana saya bilang Bapak Irjen, Pak Sekjen, lalu kemudian karena saya berberengan Plt. Budidaya saya bilang kita harus rancang ada nggak cantolan hukumnya di Undang-Undang CK, saya bilang coba cari cantolannya upaya perijinan tambak itu tunggal misalnya dipusatkan, supaya nggak liar. Itu baru dapat Ibu, jadi kita juga ngurus ini nggak, banyak sekali nggak cukup waktunya ternyata. Ini butuh 24 jam, saya itu 24 jam tidak bisa terus terang saja mikir. Nah, sehingga kemudian *modelling*-nya itu pertama adalah revitalisasi tadi, rakyat ada disitu, harus punya IPAL, harus punya IPAL yang nanti soal Amdal itu ahli-ahlinya banyak doctor-doktor di KKP yang bisa membuat itu dan nanti kemudian kita akan bicara juga dengan LHK.

Lalu kemudian juga harus ada irigasi, kan kalau irigasi selama ini disektor pertanian Ibu, di tambak nggak ada irigasinya. Akibatnya seperti di Pantura itu rusak semua, itu nggak bisa lagi jadi wilayah pertambakan. Nah, kemudian selain irigasi ada tandor. Nah, lalu kemudian persoalan yang paling berat lagi di sektor budidaya adalah soal pakan. Berkali-kali saya sudah pergi ke beberapa wilayah yang belum pernah didatangi, saya Menteri kedelapan, Jambi itu belum pernah ditangani oleh Menteri *event* yang pertama sampai kedelapan. Saya pergi kesana, ternyata di sana itu ada pohon indigofera itu yang bisa dikeringkan ditumbuk halus kemudian itu menjadi substitusi tepung ikan. Nah, saya katakan “sudah kalau gitu ini berarti kan harus dibuat”, artinya masu disuruh nanam nanti kemudian dibeli dan seterusnya. Sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Budidaya masih dalam skala lab atau skala ujicoba.

Yang kedua adalah mangrove, saya sampaikan kalau ini digiling ini membutuhkan karena kalau industri itu dilihat ukur, dilihat ukur itu kalau misalnya dia akan menjadi satu kilo tepung dia membutuhkan bahan baku bisa jadi sepuluh kilo milsanya. Nah, ini juga tidak mudah maggot. Jadi itu sudah kita lakukan tetapi kalau memang belum terefleksi di dalam program ini saya mohon maaf nanti saya akan ngundang khusus kita mesti pikir secara bareng tetapi dalam waktu yang singkat ini harus ada sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat atau publik. Contoh misalkan tadi itu yang shrimp estate yang kita perbaiki tambaknya masyarakat itu. Lalu kemudian kita siapkan bahan pakan disitu, kita siapkan *hatchery* di situ, misalnya begitu. Lalu kita siapkan juga *off taker*-nya di situ. Ini soal taker ini juga masalah karena bisa jadi orang lagi baru nanam sudah dikasih ijon. Diijonnya itu adalah dengan cara memberikan pakan nggak usah bayar dulu, bayarnya nanti belakangan misalnya begitu dan seterusnya. Bongkar seperti ini tidak mudah juga Ibu, contohnya yang kemarin saya datengin itu ikan emas di Pasaman. Waktu saya tanya di situ ada pabrik pakan yang besar yang memberikan pakan kepada mereka yang dibayarnya adalah ketika mereka panen. Nah, itu satu hal jadi memotong itu juga tidak mudah. Jadi mereka itu sudah ditaker sama seperti kayak di kaki dua tadi.

Jadi kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu, terima kasih saya mohon maaf kalau belum bisa menjelaskan secara rinci dan detail. Tapi nanti kami akan susulkan dalam bentuk jawaban yang tertulis dan mudah-mudahan bisa. Dan kemudian berikutnya tentu dalam program-program yang supaya lebih rinci, lebih detail, saya akan mengundang juga akan bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI ini karena sebagai mitra kerja agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan, satu menit saja.

KETUA RAPAT:

Kan nanti ada pendalaman.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Nggak sebentar saja.

KETUA RAPAT:

Ya, gimana.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Pak Menteri, karena Pak Menteri kan mau rapat sama Presiden ya toh. Tadi Ibu Alien berbunyi masalah lumbung ikan nasional. Saya mohon kiranya didiskusikan untuk dibuatkan Perpresnya Pak, biar jalan itu barang Pak, itu *legacy* Bapak juga gitu. Jadi jangan sampai nah sudah jempol-jempol dia, masalahnya jangan sampai ini program tertunda mangkrak berapa lama tidak terealisasi. Saya yakin Bapak bisa, karena Bapak akan bertemu dalam waktu yang sebentar lagi. Kemudian pada dasarnya kami mensupport anggaran Bapak naik asal landasan hukum berpijak Bapak aman, jangan sampai nanti terjadi seperti mitra-mitra yang lain.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Mbak Riezky.

Kelebihan dari para birokrat itu di mana pun paling pintar bikin istilah. Kita ada istilah food estate, sekarang ada istilah shrimp estate. Nah, dari food estate, dari shrimp estate itu kalau tidak menjadi produksi yang baik bagi kepentingan publik dan akan bermasalah apabila diberikan real estate. Kalau sudah diberikan real estate nah itu akan bermasalah. Semoga ini bukan hanya sekedar, saya sih nyaranin lah kita

bangun kepercayaan diri bangsa dengan baik. Saya pikir tidak usah pakai istilah yang estate-estate itu, karena apa? Dari sisi aspek ekologi saja ikan kita itu tidak mengenal kalimat estate, padi kita ini tidak mengenal kalimat estate, tapi lebih baik pakailah kearifan lingkungan di mana ekosistem tumbuh, padi tumbuh, semuanya tumbuh, istilahnya disitu agar menjadi bangsa yang unggul, karena tidak mungkin jadi bangsa yang unggul kalau kita tidak punya kepercayaan diri terhadap kalimat saja, itu saran saya.

Yang kedua, urusan ikan emas di berbagai daerah sangat banyak Bapak. Kalau berkunjung ke Purwakarta, daerah Cianjur, Cirata, Jati Luhur itu penghasil puluhan bahkan ribuan ton dalam setiap hari ikan emas. Jadi menurut saya yang paling berat itu justru bukan di Kalimantan, bukan di Purwakarta, bukan di Cianjur, tapi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, ada Mas Joko, ada Mas Wahyu Trenggono, itu mas yang paling berat. Nah, ini yang fokus kita sehingga pada hari ini kita ikuti Bapak Menteri ini ada kegiatan, kita akan masuk pendalaman. Cuma saya ngingetin Pak Menteri, eforia kita membuat tambak itu Bapak bisa di jalur utara Bekasi sampai ke Indramayu, sampai Cirebon, itu berdampak para pengusaha bangun tambak. Setelah harga ikannya jatuh, tambaknya tidak menguntungkan lagi mereka tinggalkan itu. Dan yang rusak itu adalah bibir pantai, mangrovenya habis rata-rata, ditinggalin dan dampaknya adalah abrasi. Di Pantai Utara Pakis Jaya Kerawang itu sekarang abrasinya sudah satu desa sudah hilang. Dan kemudian ketika ngusulin dibikin benteng ternyata kewenangannya PUPR sudah semakin jauh lagi kita, kementeriannya beda lagi.

Nah, selanjutnya Bapak Doktor Slamet silakan untuk melakukan pendalaman.

F-PKS (drh. SLAMET):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ketua Dedi.

Rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati,
Bapak Menteri, Bapak Sekjen beserta seluruh jajarannya yang saya hormati.

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, pertama tadi terkait dengan shrimp estate yang disampaikan oleh Pak Menteri. Secara prinsip kami mendukung Pak, cuma masalahnya nanti dalam tataran pengawasan kami perlu kemudian mengawasi bagaimana kemudian agar tidak terjadi tumpang tindih dari program. Satu contoh yang di 2022 ini dianggarkan tadi disebutkan shrimp estate itu Rp250 miliar, tempat lain juga ada untuk pembangunan Gudang beku kawasan shrimp estate sebanyak Rp15,7 miliar. Nanti ini perlu kita pendalaman diproses selanjutnya nanti definitive akan kita kemudian awasi, supaya tidak ada tumpang tindih. Saya melihat secara umum banyak anggaran yang memang menurut saya masih ada tumpang tindih atau program yang mirip-mirip, nanti kita akan dalami. Itu yang catatan saya pertama.

Yang kedua, tentunya mengingatkan Pak Sekjen, bahwa program-program yang terkait dengan pencerahan kepada masyarakat, baik itu namanya Bimtek

maupun sosialisasi sudah ada kelihatan titik-titiknya cuma arahnya tidak terlalu jelas di situ, ada 20 titik, ada 20 titik, sehingga nanti sebelum menuju pagu indikatif saya pikir menjadi untuk dilakukan pendalaman di sini menjadi penting supaya arahan-arahan dari Pimpinan Komisi ini menjadi satu realisasi untuk kebersamaan kemitraan itu.

Yang berikutnya Pak Ketua, jadi terkait koreksi sedikit tapi ini juga prinsip saya pikir di ABT 2021 ada rehabilitasi kawasan mangrove di Jawa Barat disebut Kota Sukabumi. Pak Dedi juga tahu Kota Sukabumi itu kecil tidak ada lautnya, ini mohon penjelasan saya dari Dapil sana. Kalau Kabupatennya ada Ibu, kalau kotanya tidak ada.

Dan terakhir terkait dengan PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri), sekitar Rp715,4 miliar. Setahu saya juga di Komisi IV DPR RI belum ada semacam penjelasan atau memberikan gambaran tentang bagaimana *business plan* yang atau rencana bisnis yang akan dilakukan di PHLN ini. Sehingga saya mengusulkan Pimpinan, untuk dipikirkan apakah kemudian untuk dibentuk Panja karena ini nilainya cukup besar dan terkait juga nanti di pengembalian dan bagaimana ke depan dari proses ini. Ini usulan saya untuk PHLN dipikirkan untuk dibentuk Panja.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan sekarang yang virtual Bapak Firman, silakan.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E, M.H.):

Pertama, saya memberikan apresiasi atas penjelasan dari paparan ini. Saya menyakini bahwa Bapak Trenggono ini mampu men-develop potensi sumber daya kelautan kita menjadi potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Namun, tentunya ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan sebagai pendalaman. Tadi Bapak Menteri telah menyinggung tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang kita kerjakan selama hampir 8 bulan dan sekarang sudah menjadi Undang-Undang. Pertama, itu bagaimana pelaksanaan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait dengan penyerdehaan tentang ijin atau proses ijin untuk kapal nelayan yang menjadi satu atap di Kementerian KKP karena itu sudah ada di Undang-Undang, kalau itu bisa direalisasikan maka ini akan sangat memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan kepada nelayan kita. Ini satu hal.

Dan kemudian ini juga ada yang terkait dengan masalah rencana kerja Bapak ini tentunya juga akan ada gangguan-gangguan terhadap penerimaan negara karena ada beberapa yang tentunya perlu mendapat perhatian Bapak adalah adanya penolakan-penolakan daripada masyarakat nelayan Indonesia terhadap pengoperasian kapal eks asing yang besar, karena ini akan mengeksploitasi dan kemudian juga akan merusak lingkungan kita, konon katanya seperti itu.

Dan kemudian juga ada beberapa lagi yang menjadi penolakan mereka adalah diberlakukannya pemungutan, yaitu pemungutan terhadap pembayaran PNBP pasca produksi dengan mengambil prosentase dari nilai transaksi penjualan ikan sebesar

10% untuk kapal berukuran 60 sampai 200 GT. Ini juga akan menjadi beban daripada para nelayan, karena saya khawatir juga kalau ada beban-beban pungutan pajak apalagi kalau kita melihat konsep perekonomian sekarang menjadi kontroversi adalah akan ada penguatan PPNS diperpajakan. Kalau sampai ada wajib pajak yang tidak mampu membayar maka di situ akan masuk sampai kepada penyitaan asset, padahal ini di Undang-Undang Cipta Kerja kami bersepakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, bahwa PPNS itu kewenangannya harus tetap melekat sebagaimana Undang-Undang yang diatur dengan Undang-Undang yang ada dan kewenangan daripada penyidikan-penyidikan yang lebih mendalam sampai pernyataan tetap ada, harus di bawah komando daripada Kepolisian Republik Indonesia. Ini dua hal yang perlu kami sampaikan.

Dan kemudian Pak, saya mengusulkan budidaya ikan ini perlu ditingkatkan karena ini akan menjadi penggerak ekonomi desa. Ini luar biasa karena catatan-catatan kami di beberapa tahun lalu, budidaya ikan ini bisa menggerakkan potensi ekonomi kerakyatan, karena seperti bioflok dan sebagainya itu tadi yang perlu menyempurnaan memang tapi ini menggerakkan roda perekonomian yang sangat luar biasa. Dan disisi lain Bapak akan juga menjadi salah satu penggerak daripada budaya makan ikan ini karena bisa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu gizi daripada anak. Ini luar biasa, karena kita melihat bahwa data dari PBB dari WHO mutu gizi anak kita ini sangat memprihatinkan sehingga tidak mungkin masyarakat di tingkat desa itu akan mengkonsumsi yang namanya protein dari hewani, salah satunya jalan keluarnya adalah ikan. Oleh karena itu, ini perlu mendapatkan perhatian yang serius daripada KKP agar ini menjadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan di KKP.

Yang terakhir Pak, mengenai masalah impor garam ini memang di tengah-tengah itu selalu ada pemain. Oleh karena itu, saya sepakat dengan Mbak Luluk tadi apakah tidak ada riset yang bisa meningkatkan hasil NaCl kita sehingga potensi garam nasional kita ini tentunya bisa diperbaiki, sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal. Karena memang impora garam dari luar negeri jauh lebih murah kalau itu dikompetensi memang para petani garam kita ini sulit untuk berkompetensi dengan garam-garam yang dari impor.

Yang paling akhir saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri, karena saya menyadari bahwa dalam penyusunan program dan anggaran APBN dalam posisi pandemi sekarang ini memang sangat sulit luar biasa, karena penerimaan negara yang semakin merosot, di sisi lain Bapak sebagai Menteri KKP yang berhadapan dengan masyarakat dituntut untuk menaikkan program yang sebesar-besarnya. Di sisi lain penerimaan negara mengalami kemerosotan yang sedemikian rupa. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada Bapak Menteri dan seluruh jajarannya yang telah menyampaikan program-program kepada kami di Dapil tentunya ini merupakan sebuah aspirasi yang baik. Dan mohon kiranya kalau ada aspirasi dari Anggota Dewan Pak, yang disampaikan baik secara melalui rapat atau tertulis, ini mohon juga diperhatikan dan dipertimbangkan karena aspirasi kita sebagai Anggota Dewan ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang dan kemudian dalam sumpah jabatan itu menjadi salah satu janji kita. Oleh karena itu, mohon diperhatikan dan *Insyah Allah* saya meyakini duet maut antara Pak Trenggono yang kemarin....

KETUA RAPAT:

Mati ya.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E, M.H.):

.... Perikanan dan ada Pak Antam *Insyah Allah* ini akan bisa berjalan karena dua-duanya ini merupakan yang satu ini Pak Trenggono adalah business man sehingga saya yakin pola pikirnya adalah bagaimana membangun daripada potensi ekonomi kelautan ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Saya rasa ini Pak, yang perlu kami tekankan dan ini menjadi isu di masyarakat khususnya nelayan, terutama penolakan ijin kapal asing yang GT besar ini juga mohon mendapat pertimbangan.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Firman, berkali-kali menyampaikan tentang apresiasi dan duet maut. Saya sih jujur tidak mau duet maut, saya ingin ada duet bahagia. Karena kalau duet maut berarti ujungnya kematian, kan maut itu mati ya itu istilah. Kalau di kita duet maut itu duet yang terhebat, kalau saya sih duetnya duet bahagia saja, karena memang pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang melahirkan kebahagiaan dan kesejahteraan publik itu diukur dari kebahagiaan. Orang Indonesia itu duit nggak punya tapi mukanya selalu senyum, yang duitnya banyak saya lihat jarang senyum malah. Nah, kalau Pak Panggah ini saya nggak tahu banyak atau tidak duitnya yang jelas senyumnya ditutup oleh masker.

Silakan Pak Panggah.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Bapak-Ibu Anggota dan Bapak Menteri yang saya hormati, beserta jajarannya.

Saya sedikit saja untuk pendalaman tadi sudah disampaikan terkait dengan bioflok, program bioflok yang tadi disinggung oleh Ketua dan juga Pak Firman. Benar apa yang dikatakan itu bahwa program ini bisa menggerakkan potensi ekonomi dipedesaan Pak. Ini perlu ditekuni Pak, perlu untuk terus dikawal karena masih ada beberapa hal yang merupakan kelemahan dari program ini, terutama adalah pertama dari desainnya saja ya Pak, dari desain dari bioflok itu sendiri masih banyak kelemahan-kelemahan. Sehingga kalau begitu saja dilepas itu bisa mangkrak, itu sudah terbukti banyak yang mangkrak. Oleh karena itu, kami terus terang di Dapil kami, kami kawal melalui tim saya. Jadi mana-mana yang masih kurang kita kawal dan juga kita kirim untuk pelatihan-pelatihan dengan biaya sendiri. Karena kalau kelompok ini tidak punya kemampuan untuk bisa melengkapi seluruh infrastruktur dan program pembudidayaan bioflok ini.

Oleh karena itu, karena ini program yang bagus mohon untuk bisa dikawal. Yang pertama, selain tadi soal desain dan pendampingan juga misalnya soal pakan

Pak, ini yang menjadi komponen biaya yang paling besar. Oleh karena itu, coba dipikirkan Pak Syarif Bapak Kepala Badan untuk bisa ini diteliti Pak, pakan-pakan yang sekiranya bisa *me-reduce cost* daripada produksi itu, karena itu bisa 70% sendiri dari biaya keseluruhannya. Ini kami juga menghitung sendiri soal kelayakannya ini, mungkin kalau dari KKP bisa menghitung dari awal kita tidak perlu menghitung lagi, ini kita kayak bikin *pilot project* sendiri ini Pak, untuk menghitung kira-kira kelayakannya seperti apa, kalau lele bagaimana, kalau ikan nila bagaimana. Ini alangkah kita diperingan kalau misalnya hitung-hitungan itu sudah disampaikan kepada kami.

Itu juga soal bibit, bibit ini penting sekali pada penerimaan yang terakhir bibitnya tidak seragam ini, bahkan tercampur dengan cebong itu, anak kodok itu tercampur. Ini artinya bahwa ini tidak teliti ini, ini temuan yang dilapangan. Intinya seperti itu, ini kalau bisa menjadi program unggulan atau program andalan ya di KKP dan juga program andalan bagi kita yang ada di konsituen.

Kemudian yang berikutnya tentu kami terima kasih kepada Direktorat Jenderal Karantina. Dengan program gemar makan ikan karena kami tekankan supaya gemar makan ikan ini mengambil bahan baku ikan dari setempat. Dan ini sudah berlangsung dan diolah oleh masyarakat setempat. Jadi kemarin kami mengikuti program gemar makan ikan itu bagus sekali. Jadi sebagian malah dari panen bioflok, ikan-ikannya itu diambil. Nah, inikan suatu integrasi yang bagus sekali Pak. Nah, ini mohon saya hanya itu yang bisa kami sampaikan.

Kemudian masalah estate-estate itu tadi juga sudah dibahas panjang lebar, coba dilakukan penelitian dulu apakah ini *visible* apa nggak terkait dengan estate-estate tersebut ya. Karena biayanya sangat mahal ini ya, kalau tidak dilakukan pendahuluan dari suatu kajian saya kira akan menjadi muspro untuk suatu biaya anggaran yang cukup besar.

Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya harapkan tidak ada lagi setelah Pak Abdullah Tuasikal nggak ada lagi yang ngusulin lagi, karena kita ingin tepat nanti jam 13.00 WIB sudah selesai kesimpulan, karena kesimpulan harus kan harus disepakati bersama dengan Menteri. Jangan sampai nanti Sekjen yang menyimpulkan menterinya nggak sepakat.

Silakan Bapak Abdullah Tuasikal.
Terima kasih.

F-NasDem (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Bapak Menteri, Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Saya ringkas saja, ini soal lumbung ikan nasional. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan bahkan rekan-rekan Anggota Dewan Pak Menteri semua yang telah memberikan support, sehingga lumbung ikan nasional *Insyah Allah* sudah mulai agak berjalan. Dan kita harapkan sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, bisa terselesaikan sampai tahun 2023. Lumbung ikan nasional ini saya kira Pak Menteri sendiri juga punya matematika perhitungan ekonomi. Dan ini juga untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan minimal untuk tenaga kerja mungkin ada sekitar 30.000. Untuk itu, saya kira pernah kita juga memberikan dukungan lewat kesimpulan. Pernah kita berkesimpulan bahwa mendukung lumbung ikan nasional. Untuk itu, apa yang disampaikan oleh Ibu Kiki tadi bahwa kalau dapat itu harus ada Peraturan Presidennya. Untuk itu, saya mengharapkan dukungan selanjutnya dari teman-teman Komisi IV DPR RI, agar Peraturan Presiden soal lumbung ikan nasional di Maluku itu harus ada, agar dalam pembangunan tidak terhambat seperti kegiatan-kegiatan yang lain. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini soal benih ikan. Benih ikan 1 juta ekor ini tidak sedikit cukup besar. Wilayahnya berbeda, kita di Maluku memang memiliki, mungkin juga Maluku Utara, mungkin daerah-daerah lain, kita memiliki potensi. Untuk itu, benih ikan ini kita harus dari bawah, kita harus lihat potensi lahannya dan lain-lain. Lalu habis itu kira-kira sarana dan prasarana apa untuk kita menggali potensi ini. Sumber daya air tawar itu sama dengan air laut, air laut itu ada jaring apung, kalau air tawar ya hampir sama dengan itu, jadi fasilitasnya kita siap. Kalau kita sudah dapat kira-kira berapa hektar yang dimiliki oleh kita mau bangun baru kita sesuaikan dengan benih ikan yang digunakan. Kareba saya lihat pengalaman, pertama 500 ribu ekor saya tidak tahu seperti apa tapi 500 ribu sekarang 1 juta ekor. 1 juta ekor dengan ukuran benih 2,5 centi itu pasti sampai di masyarakat itu mungkin kurang lebih 50% sudah mati ya. Dan saya kira harus perencanaannya kita rubah, tidak perlu harus 1 juta ekor tapi kalau 500 ekor benih dengan besarnya sekitar 5 sampai 7 centi, saya kira kemungkinan hidupnya itu sangat cukup tinggi. Lalu yang kedua, mungkin ya kalau untuk di Maluku, mungkin di lain, kalau untuk dikasih benih ikan 1 juta lebih baik kita minta saja ekskavator mini berapa buah, ada di kabupaten-kabupaten sehingga kita bisa dapat meningkatkan lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Saya kira itu.

Mungkin yang terakhir Pak Menteri, ini soal ada kapal ini kapal yang beroperasi di laut Arafura 718. Kurang lebih ada sekitar 300 unit dan SIUP-nya atau CV-nya itu dari Provinsi Maluku. Mungkin dari Maluku, ada juga dari Maluku Utara atau Maluku dan beroperasi di Arafura tapi pendaratan ikannya itu di daerah Fakfak, sehingga saya kira kontrol ini kita harus tingkatkan. Lalu yang terakhir, mungkin terakhir sekali ini loan lain dibuat 30 GT itu sudah merapat itu kurang lebih sekitar 3 mill. 3 mill ini di sana itukan pasti ada rompa-rompo yang dimiliki oleh nelayan setempat. Kalau kailnya kena itu maka sasarannya romponya itu diputuskan. Untuk itu, mungkin ada regulasi atau kira-kira lokasi-lokasinya harus diatur, zonasinya harus diatur, itu agar tidak mengganggu nelayan dari luar dengan nelayan dari pesisir, masyarakat setempat sehingga tidak ada terjadi benturan. Wilayah kita ini wilayah agak keras, kalau benturan itu agak susah. Untuk itu, kita hindari benturan saja, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, Papua, itu hampir sama, sopan santunnya sangat tinggi. Untuk itulah mari kita

harga sopan santun itu dengan regulasi-regulasi yang diatur agar tidak ada benturan di lapangan. Saya kira itu Pak Menteri.

Terima kasih.

PERGANTIAN KETUA RAPAT

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Saya rasa itu adalah pendalaman yang terakhir dari Pak Abdullah Tuasikal. Pak Menteri, mohon mengingat waktu mungkin nanti jawaban-jawaban yang tidak bisa disampaikan pada rapat ini, kita harapkan jawaban tertulisnya.

Sebelum kita mengakhiri Rapat Kerja hari ini, ijin kami akan menampilkan dan membacakan bersama kesimpulan/keputusan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kesimpulan/Keputusan.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap usulan pagu anggaran belanja pada tahun 2022 yang semula sebesar Rp6.122.087.000.397,- (enam triliun seratus dua puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditambah sebesar Rp8.043.438.587.000,- (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp14.165.525.984.000,- (empat belas triliun seratus enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan program dan kegiatan prioritas pendukung pemulihan ekonomi nasional terutama masyarakat kelautan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha perikanan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal semula sebesar Rp519.107.535.000,- (lima ratus sembilan belas miliar seratus tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp578.158.619.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - b. Inspektorat Jenderal semula sebesar Rp87.424.408.000,- (delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp88.541.124.000,- (delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap semula sebesar Rp770.091.758.000,- (tujuh ratus tujuh puluh miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.105.794.968.000,- (dua triliun seratus lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya semula sebesar Rp1.143.447.870.000,- (satu triliun seratus empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp4.979.840.202.000,- (empat triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus dua ribu rupiah);

- e. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp384.597.909.000,- (tiga ratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp778.841.122.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- f. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut semula sebesar Rp384.340.414.000,- (tiga ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.229.880.290.000,- (satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- g. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp966.276.909.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.332.120.563.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus dua puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp1.368.443.706.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.308.148.925.000,- (dua triliun tiga ratus delapan miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- i. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan semula sebesar Rp498.356.888.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp764.200.172.000,- (tujuh ratus enam puluh empat miliar dua ratus juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Komisi IV DPR RI?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, ijin ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Ichsan silakan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik, terima kasih Ketua.

Bapak Menteri dan teman-teman yang saya hormati.

Kalau kalimat seperti ini terkesan bahwa kita sudah menyetujui, bukan menyetujui ya mendukung. Artinya, ini kita harus pisahkan mana yang memang betul-betul pagu yang sudah ada plus dengan apa yang diusulkan. Jadi jangan digabung seperti ini kalimatnya. Kalau saya kalau boleh konkrit, inikan baru pagu indikatif belum definitif. Kalau saya seperti kebiasaan saja, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan KKP terhadap usulan pagu anggaran yang sebesar sekian Rp6 triliun. Namun, Komisi

IV DPR RI juga mendukung penambahan alokasi anggaran sebesar ini sehingga menjadi ini, gitu loh. Jadi kalau kalimat seperti ini agak rancu menurut saya, karena nanti penambahan pagunya itu nanti tergantung pada saat pidato kenegaraan Presiden. Ini nggak bisa kalimatnya seperti ini.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Ichsan kami tawarkan opsi kalau gitu kalau kita mau kita pisahkan, jadi kita menerima penjelasan sesuai pagu indikatif, yaitu Rp6 triliun. Nanti mungkin di kesimpulan nomor 2 kita mendukung saja.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bukan, lanjutkan saja kalimatnya. Namun, Komisi IV DPR RI mendukung penambahan anggaran KKP sebesar sekian.

KETUA RAPAT:

Sebesar Rp8 triliun.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Persis.

KETUA RAPAT:

Titik.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Titik gitu saja, dengan rincian sebagai berikut, satu a Sekjen berapa, terus tambahannya berapa, begitu Pak Ketua. Jadi jangan ditotal dulu nantikan tergantung berapa jumlah yang ini, kalau kalimat seperti ini khawatirnya Banggar maupun Bappenas atau apapun, siapa pun gitu ya, kok KKP sudah disetujui RP8 triliun, ada Rp14 triliun nggak bisa begitu itu. Jadi ada plusnya begitu, dipisahkan saja. Saya usul begitu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ichsan, saya rasa usul yang baik.
Pertanyaan berikutnya yang point-point di setiap Direktorat Jenderal.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Sekjen misalnya semula, Sekretariat Jenderal dengan pagu anggaran sebesar Rp519 miliar misalnya titik dan penambahannya adalah sekian, nggak usah ditotalin, penambahannya saja.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Jadi tidak total 579 itu, bahwa ada usulan penambahan anggaran sekian.

KETUA RAPAT:

Bisa disempurnakan sekretariat masukan Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Perlu saya dikte, nggak perlu ya. Nanti Bahasa Indonesia saya nilai saya D Pak Menteri waktu kuliah.

KETUA RAPAT:

Teman-teman Komisi IV DPR RI ada masukan lainnya bisa diterima usulan Pak Ichsan. Tolong dikoreksi kita lanjut ke kesimpulan berikutnya dulu. Kita akan kembali ke point 1 nanti.

2. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan sisa anggaran belanja pada tahun 2021, serta melakukan pendalaman rencana anggaran belanja tahun 2022 secara terarah, terukur dan akuntabel dengan prioritas program padat karya, bimbingan teknis, dan penyuluhan untuk seluruh nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha sektor kelautan perikanan.

Komisi IV DPR RI?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, bukan sisa itu “mengoptimalkan anggaran belanja”.

KETUA RAPAT:

Sisanya tolong dihapus.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kalau sisa terkesanya gimana gitu.

KETUA RAPAT:

Saya ulangi.

2. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan anggaran belanja pada tahun 2021, serta melakukan pendalaman rencana anggaran belanja tahun 2022 secara terarah, terukur dan akuntabel dengan prioritas program padat karya, bimbingan teknis, dan penyuluhan untuk seluruh nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha sektor kelautan perikanan.
Komisi IV DPR RI?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pimpinan, Suhardi.

KETUA RAPAT:

Pak Suhardi.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya minta di situ koma, dan memperhatikan kultur dan kearifan lokal tangkap dan budidaya di daerah, supaya jangan seragam kan. Iya, perikanan tangkap dan budidaya di daerah. Dengan memperhatikan kultur dan kearifan lokal perikanan tangkap dan budidaya di daerah.

Terima kasih Pimpinan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Mungkin biar lebih luas nggak usah dan budidaya, perikanan tangkap dan kelautan. Perikanan dan kelautan dan budidaya di daerah.

KETUA RAPAT:

Masuk semua ya.
Komisi IV DPR RI?
Pemerintah, Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, yang penting Bimteknya dan sosialisasi ada ya Pak Ketua. Saya cuma mengingatkan karena teman-teman tadi pada nanya.

KETUA RAPAT:

Berikutnya kesimpulan nomor 3.

3. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat anggaran armada dan personil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam menjaga sumber daya ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan.

Komisi IV DPR RI?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Untuk memperkuat anggaran armada, sarana prasarana, dan personil.

KETUA RAPAT:

Tambah sarana prasarana.

Ada tambahan teman-teman Komisi IV DPR RI?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, ini sarasannya memang harus dipertegas. Saya pikir kalau untuk memperkuat anggaran armada, sarana dan prasarana, inikan baru mau diusulkan oleh Kementerian Perikanan di anggaran non operasional. Mungkin lebih fokus saja Ketua ini.

KETUA RAPAT:

Lebih fokus jadi maksudnya khusus armada atau apa maksudnya lebih fokus.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Yang jadi permasalahan kan pelabuhan.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi maksudnya fokus tadi memperkuat sarana dan prasarana saja.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Intinya ke pengawasan sih Ketua.
Terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Pimpinan.

Saya rasa komposisinya sudah benar itu, ini untuk pengawasan armada karena mayoritas juga sarprasnya itu kapalnya sandar di mana, lautnya di mana, kan begitu. Jadi hal-hal teknis kayak gitu, ada kapal nggak ada tempat naruhnya sama saja.

KETUA RAPAT:

Mungkin Pak Menteri ada masukan atau Pak Sekjen, sudah oke.
Teman-teman Komisi bisa disetujui?
Teman-teman Komisi IV DPR RI setuju ya?
Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan budidaya ikan hias serta pemasarannya di mana pada saat pandemi covid-19 ini dapat membantu perekonomian mereka.

Komisi IV DPR RI?

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Tidak hanya ikan hias saya kira Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan ditambahkan Pak Panggah.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Budidaya ikan hias termasuk ya ikan konsumsi, bioflok dan lain-lain itu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Ijin Pak Ketua, jadi tadi ikan hias dan sekarang ini *in* tanaman hias yang ada di kolam di ekspor. Nah, itu sudah dilakukan oleh Balai Biogen Kementerian Pertanian. Nah, saya ingin ada sinergitas itu. Nggak tahu namanya apa ya Pak, tanaman hias kolam yang sudah diekspor ke Korea dan, sudah diekspor itu ya.

KETUA RAPAT:

Kalau nggak salah tanaman hiasnya itu masuk ke pertanian Ibu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Iya, mestinya bersinergi dengan dan satu lagi ikan cupang, ikan cupang itu sudah *on going* juga.

KETUA RAPAT:

Ikan cupang itu ikan hias kan, ikan cupang itu termasuk ikan hias kalau tidak salah ya.

Pak Slamet tadi ada masukan, silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi ini kesimpulan Rapat Dengar Pendapat jadi kalau kita nyebut secara spesifik agak ada sesuatu yang mungkin kurang pas begitu. Apalagi ini kalau kita berbicara tentang akibat dari covid, hampir semua sektor ini adalah kena akibat dari covid. Sehingga menurut saya kalau mau bicara tentang penanganan covid ya diambil secara umum seluruh pelaku dari itu. Jadi menurut saya tidak perlu disebut secara spesifik Pak Ketua, ini menimbulkan hal-hal yang kurang pas nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau ini dinilai terlalu spesifik saya tawarkan apa kita hapus saja point nomor 4.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Ya nggak apa-apa kalau spesifik biar lebih jelas toh Pak Ketua. Ikan hias dan ikan konsumsi mungkin covidnya itu saja yang hilang, karena itu kan tidak hanya pada masa covid ya. Itu memang betul-betul bisa membantu masyarakat.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINA, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Ketua, saya boleh.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Ketua.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINA, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sebenarnya kalau ikan konsumsi kan kita sudah banyak berbicara kan itu dari awal. Yang menjadi tekanan saya inikan tadi saya angkat memang, karena selama ini kita kurang memperhatikan itu. Dan sebenarnya di dunia global itu sudah menjadi tren sekarang. Dan Indonesia saat ini jarang sekali ikut di dalam kompetisi-kompetisi atau ekspo atau apapun lah yang terkait dengan ikan hias, padahal sebenarnya kita punya potensi besar. Apalagi sekarang dalam covid ini, pandemi ini luar biasa peningkatannya. Dan itu perlu pendampingan yang lebih serius gitu.

KETUA RAPAT:

Oke, kalau gitu saya tawarkan begini, nomor 4 ya kita tetap masukkan.

4. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan budidaya ikan hias serta pemasarannya.

Ikan konsumsinya mungkin dihapus.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Mungkin boleh kalau saya.

KETUA RAPAT:

Sebentar ini saya tawarkan dulu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Boleh usul?

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Jadi misalnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan, jadi Kementerian jangan Menterinya. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan budidaya khususnya pada budidaya yang memiliki nilai ekspor yang tinggi, memiliki nilai

ekonomi yang tinggi dan sekaligus. Melakukan budidaya khususnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi terutama di situasi pandemi covid ini dan seterusnya. Saya kira begitu. Jadi tidak spesifik karena bukan hanya ikan hias, kalau saya mau sampaikan sedikit Ibu, ikan hias itu pasar globalnya kira-kira sekitar 300 juta Dolar. Dan pelaku usaha di situ atau orang yang bekerja di situ kira-kira sekitar 50 ribu. Tapi ikan-ikan yang spesifik seperti tadi itu seperti yang saya sebutkan misalnya ikan dewa dan sebagainya itu mempunyai nilai yang besar juga. Nah, itu bisa dikembangkan juga.

Kira-kira begitu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ikan hiasnya kalau gitu gini, karena itukan juga termasuk lah jadi kita ambil global dan makronya. Jadi nggak usah ikan hias, ikan hiasnya tidak perlu dimasukkan. Coba dihapus dulu ikan hiasnya, khususnya budidaya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta pemasarannya di mana, pada saat pandemi covid-19 ini dapat membantu perekonomian mereka. Ibu Anggia bisa diterima?

F-PKB (ANGGIA ERMA RINA, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya minta komitmen saja, komitmen ke kementerian, kira-kira apakah kalau dengan redaksi seperti ini ada perhatian khusus untuk ikan hias. Itu Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Dijamin Ibu, salah satunya yang di sana itu yang di Cibinong akan kita bangun pusat pameran ikan hias.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Bukan di Parung?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Di Cibinong, karena kita pernah melakukan.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri maaf, kalau ditambah *sorry* ini untuk penekanan saja ya, karena ini budidayanya nggak tahu budidaya apa. Kalau kita tambahkan khususnya pada budidaya ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi bagaimana.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Kementerian Kelautan dan Perikanan pasti budidaya ikan.

KETUA RAPAT:

Atau macam-macam yang lain.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Nggak mungkin budidaya ternak lain selain ikan.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Luluk dulu terus Pak Ichsan.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Ini karena termotivasi ikan hias, dulu saya pernah mengirimkan kalau tidak salah kepada Pak Sekjen ya itukan kita punya beberapa sebenarnya yang ini ternyata sudah memenuhi pasar di Eropa juga. Pak Menteri sudah paham *nggeh*, nah ini kita butuh sebenarnya sesekali diangkat oleh KKP, karena yang pertama yang terkait apakah itu berdasarkan kuota atau apa, karena itu nanti bisa liar banget, itu hanya ada di Indonesia. Dan itu harganya padahal satu saja itu dinilai tertinggi itu pernah terjual sampai Rp25 juta. Tetapi di sisi lain para penangkapnya penduduk lokal di Papua itu luar biasa menyedihkan dan *nyuwun sewu* Bapak, beberapa aparat militer itu juga terlibat dalam hal proses penangkapan itu. Kita nggak ngerti nyebutnya itu ikan atau udang, karena memang bentuknya udang tetapi warna-warni dan itu hanya kita yang punya. Masuk ikan hias, nah kalau kayak gini sih saya mendukung sebenarnya jadi bukan hanya soal pembinaannya tetapi juga aspek perlindungannya itu juga sangat penting. Dan juga pengaturan mungkin kuotanya karena kaitanya dengan apendik dan macam-macam gitu. Dan saya kira itu sih Ketua, saya nggak tahu, tetapi intinya mendorong KKP karena nggak pernah diungkap ini tapi ini di-ground-nya itu sudah terjadi perdagangan yang sangat besar di dunia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya hanya meluruskan saja bahwa raiser itu ada di Cibinong bukan di Parung Ibu, itu Dapil saya itu. Saya mau ngasih tahu Pak Menteri itu Dapil saya itu raiser itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terkait redaksi nomor 4 mungkin ada masukan lagi.
Setuju ya Bapak-Ibu ya Komisi IV DPR RI?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menyelesaikan penyaluran program kegiatan yang belum terealisasi pada Anggaran Belanja Tambahan tahun 2020 sebesar Rp114,85 miliar beserta anggaran pendamping kelompok berupa bantuan ikan konsumsi, udang, ikan hias, cacing sutera, kepiting, dan budidaya ikan dalam ember. Mengingat kondisi saat ini masyarakat membutuhkan untuk pemulihan ekonomi mereka.

Komisi IV DPR RI?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Mohon ijin Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Khusus yang ini kami sudah berkali-kali menyurati Kementerian Keuangan untuk kemudian kita tarik kembali karena itukan belum terpakai sama sekali situasi akhir tahun 2020. Dan kita juga sampaikan hasilnya selalu ditolak, jadi ini agak kesulitan kita dari sisi pembiayaannya dari mana, itu saja konsen kami.

Terima kasih.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, ijin.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Justru dengan point 5 ini Pak Menteri, kita mendorong inikan persetujuan antara Menteri Kelautan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI Pak. Ini kita jadikan dasar bahwa memang ini bukan hanya versinya Kementerian saja, ini ada kekuatan politik yang bisa kita dorong agar Kementerian Keuangan itu bisa mengambil, kita bisa ambil kembali ABT ini gitu. Kan selama ini kata Pak Menteri tadi bilang bahwa kesulitan, tapi dengan adanya kesimpulan ini jadi dorong politik kita, daya dorong secara kuat. Bahwa kemudian ini nanti seperti apa ya kita bisa minta lagi nanti kita berulang-ulang. Memang Menteri Keuangan kadang-kadang harus diingatkan oleh DPR RI Pak Menteri, tapi point 5 ini kita jadi daya dorong. Begitu Ketua.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Mungkin satu lagi yang kata-kata Menteri diganti Kementerian ya.

KETUA RAPAT:

Baik, saya ulangi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Saya kira semua ya karena di atas juga masih ada, menteri itu diganti Kementerian.

KETUA RAPAT:

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menyelesaikan penyaluran program dan kegiatan yang belum terealisasi pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2020 sebesar Rp114,85 miliar beserta anggaran pendamping kelompok berupa bantuan ikan konsumsi, udang, ikan hias, cacing sutera, kepiting, dan budidaya ikan dalam ember. Mengingat kondisi saat ini masyarakat membutuhkan untuk pemulihan ekonomi mereka.

Komisi IV DPR RI?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Ijin, kalau berkomitmennya diganti dengan berusaha bagaimana?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Nggak bisa Pak Menteri, saya ijin Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bahwa kita ini adalah komitmen antara Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan itu dijadikan dasar. Kalau berusaha itu kesannya hanya tunggal, itu usahanya Kementerian Kelautan Perikanan saja, tapi kalau sudah komitmen ini DPR RI sama ini. Begitu Pak Ketua, ijin.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Karena itukan anggarannya atas dasar anggaran dari tambahan. Jadi kalau kemudian kami mengatakan bahwa ini berkomitmen itu harus terealisasi di 2021 ini atau 2022 harus terjadi. Maka satu-satunya cara adalah menggeser program dari

yang tadinya program bisa digeser ke dalam program ini, misalnya seperti itu. Tapi itukan tidak mungkin Pimpinan, dengan kondisi dana yang ada. Jadi kalau berusaha itu maksud saya kita berusaha lagi minta lagi kepada Keuangan. Itu saja alasan saya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, Pimpinan ijin.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ini kan komitmen yang kita sepakati bersama untuk mendorong kemitraan kita khususnya untuk di KKP. Jadi kalau seandainya kita berusaha berarti ada salah satu pihak. Jadi komitmen ini penting Pak Menteri, jadi kalau komitmen ini berarti antara kedua belah pihak saling mendukung dan saling menyamakan persepsi untuk kebutuhan tersebut. Jadi saya pikir untuk komitmen tetap ditaruh karena ini memang kita berkomitmen untuk membangun KKP yang tentunya di situ ada nelayan 15 juta.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, saya rasa begini bahwa memang kami meminta komitmen supaya ada kesepakatan dari dua arah. Kan ini salah satu point dari rapat ini adalah dukungan anggaran tambahan di atas pagu indikatif sebesar Rp6 triliun menjadi ditambah Rp8 triliun. Di mana salah satu Direktorat Jenderal yang mendapatkan porsi tambahan paling besar itu adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Ya mungkin siapa tahu ini tahun 2022 kan bisa menjadi bahan untuk nanti diselesaikan sekitar Rp114 miliar ini yang belum terealisasi. Kira-kira gitu Pak Menteri.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sedikit usul, ini sebenarnya kan kita ingin mendorong Pak Menteri dalam hal ini Kementerian KKP untuk minta kembali ke Menteri Keuangan, kan gitu ya. Sehingga kalau bahasanya Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah cq. Kementerian Kelautan maksudnya biar Pak Menteri KKP ini bersama-sama dengan itu untuk minta kembali kepada Menteri Keuangan, karena ini bukan mitra kita sehingga kita cq. nya kesitu. Kalau ada usulan begitu Pimpinan, terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Suhardi.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya kira kita juga harus realistis ya, anggaran tahun 2020 mau direalisasi di 2021 atau ini agak-agak sulit bagi Kementerian, karena sudah menjadi sisa anggaran di Kementerian untuk masuk 2021. Nah, kecuali kalau ini program ini dibawa ke 2022 itu menjadi prioritas itu memungkinkan bagi Kementerian. Jadi kalau dipaksakan ini anggaran 2020 diminta dari Kementerian Keuangan, saya kira hampir nggak ada lagi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Suhardi.

Kalau memang ini dinilai kalau dalam konsep seperti ini ya secara teknis mungkin nggak bisa ya Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, saya mau tanya sama Pak Menteri atau Pak Sekjen ini, sebenarnya ABT inikan masih bisa kita ambil kan. Sebenarnya masih bisa asal masih bisa tapi walaupun Menteri Keuangannya kita tahulah Menteri Keuangan inikan konservatif kira-kira begitu ya. Nah, dipoint 5 ini kita ingin mendorong agar “eh, balikin lagi deh uang kita” gitu loh, jangan sampai dilempar kemana-mana begitu. Tapi bahwa kemudian yang penting point 5 ini adalah bagian dari upaya Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan itu untuk mengambil kembali anggaran itu. Artinya, kita mendukung secara politis bahwa KKP itu kita ambil kembali anggaran yang sudah selama ini dikembalikan oleh KKP ke negara melalui Kementerian Keuangan. Jadi ini kesimpulan ini kita malah mendukung KKP sesungguhnya bukan apa-apa begitu. Kita ambil lagi bahwa kemudian mau dipakai buat apa ya nanti kita sama-sama bicara gitu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Mohon ijin Pak Ichsan yang terhormat.

Kalau berkomitmen dalam kata-kata di sini berarti memang kita harus melakukan. Bahwasanya ABT itu sudah kita minta seperti yang Bapak sampaikan dan selalu ditolak, dan kita juga paham karena memang kondisi keuangan negara. Nah, tetapi kalau itu memang menjadi satu hal yang bagian dari dukungan Komisi IV DPR RI kepada kita mungkin bahasanya mohon dirubah jangan komitmen. Tapi mungkin bahasanya dirubah menjadi, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk misalnya itu mengambil atau meminta kembali ABT tahun 2020 sebesar Rp114,85 miliar yang belum terpakai. Belum terpakai karena soal waktu yang tidak mencukup. Nah, mungkin seperti itu kalau seperti itu kami setuju.

Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi kata berkomitmennya dihilangkan saja, coba jadi langsung untuk menyelesaikan. Jadi “Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan penyaluran program dan kegiatan yang belum terealisasi pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2020 bla...bla”.

Komisi IV DPR RI?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat target realisasi anggaran tahun 2021 sehingga program kegiatan dapat dirasakan oleh masyarakat kelautan dan perikanan.

Komisi IV DPR RI?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah cq. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan percepatan penerbitan landasan hukum melalui peraturan perundang-undangan terhadap program lumbung ikan nasional.

Komisi IV DPR RI?
Pak Menteri.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji ulang program shrimp estate seluas 100 hektar dengan nilai sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) yang sesuai dengan landasan hukum, arah kebijakan nasional, serta tidak tumpang tindih program yang sama dengan Kementerian lainnya, sehingga kebermanfaatannya dirasakan oleh masyarakat kelautan perikanan.

Komisi IV DPR RI?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ichsan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Point 8 ini saya pikir bukan hanya mengkaji ulang program spesifik seperti itu. Inikan kita sedang membahas pagu indikatif, nanti pas definitif itu kita baru mendalami. Tetapi kesempatan ini bukan hanya sekedar program shrimp estate, banyak sekali program-program yang mestinya kita coba refocusing kembali. Artinya, jangan hanya spesifik pada program shrimp estate gitu maksud saya Pak Ketua. Ini tadi teman-teman sudah menyampaikan terkait dengan Dirjen PDS, Dirjen Tangkap dan sebagainya, inikan baru pagu indikatif.

Nah, menurut saya kalau saya lebih senang kemudian usul saya “Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kaji ulang seluruh program”, kan ini kesempatan juga nanti kita dalam setelah pidato kenegaraan Presiden 16 Agustus 2021. Seluruh program kegiatan di Kementerian yang ada untuk tahun 2022 sesuai dengan landasan hukum, arah kebijakan nasional, serta yang bermanfaat untuk kesejahteraan para pelaku pemangku kepentingan di kelautan dan perikanan”. Secara umum saja bahwa ini kita membuka ruang untuk melakukan revisi atau refocusing tidak hanya pada konteks ini tapi konteks yang secara garis besar. Nggak usah termasuk tapi seluruhnya, keseluruhan gitu. Gitu Pak Ketua, saya ijin gitu Ketua. “Serta lebih memprioritaskan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan”.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ibu Kiki silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Saya rasa 8 itu spesifik itu karena inikan program besar yang mau dibuat oleh Pak Menteri. Kita dukung tetapi yang Dirjen-Dirjen itu ditambah saja di point berikutnya saja, gitu. Jadi point 8 tetap kalau ditambah itu jadi point 9 atau terserah mau dibalik atau gimana terserah.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, ijin.

KETUA RAPAT:

Ya, Ibu Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Inikan pagu indikatif tadikan juga sesuai apa yang disampaikan Pak Menteri masih ada proram-program yang masih mau diperbaiki atau mungkin mau difokuskan lagi. Untuk di shrimp estate inikan hanya satu program, tapi yang di bawah ini adalah hampir kita tidak hanya fokus dalam satu program tapi ini keterbukaan untuk semua program. Jadi mendingan kita nggak usah bicara tentang satu program karena ini masih indikatif bisa berubah kapan saja, sebaiknya kita buka untuk semua program dan tidak usah menyebutkan satu kegiatan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang, saya setuju ya kita bicara program yang lain juga jadi mungkin tidak usah spesifik nomor 8 itu mungkin dihapus saja, kita lihat secara keseluruhan terlebih dahulu. Coba saya ulang ya, ini masukan tadi input dari Pak Ichsan ya nomor 8.

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian ulang seluruh program dan kegiatan di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2022 sesuai dengan landasan hukum, arah kebijakan nasional, serta lebih memprioritaskan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan Kelautan dan Perikanan.

Bagaimana Komisi IV DPR RI, setuju?
Pemerintah, Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

9. Komisi IV DPR RI meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberikan penjelasan terhadap program dan kegiatan anggaran tahun 2022 secara terperinci, serta jawaban tertulis paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat Kerja ini.

Komisi IV DPR RI?
Pak Menteri, Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Kita kembali ke nomor 1 dulu.

F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H./ WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Menteri, Pak Menteri kan mau rapat, inikan hanya redaksional Pak.
Silakan Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kalau inikan cuma redaksional 2 menit lah.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Oke, 2 menit ya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Kan dari sini ke istana 15 menit Pak Menteri, kan ada ngiung-ngiung.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Ijin Bapak Pimpinan, saya pikir kan 2 menit kita malah jadi lama. Pak Menteri, silakan saja inikan redaksional administratif Pak. Pimpinan itu terlambat itu jadi masalah di depan Presiden bukan main, saya mengerti Pak, atau nanti disusul gampang.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen, tolong diperhatikan angkanya ya Pak ya.
Itu saya bacain dulu deh, saya bacain dulu, coba tarik paling atas.

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap usulan usulan pagu anggaran belanja pada tahun 2022 yang semula sebesar Rp6.122.087.000.397,- (enam triliun seratus dua puluh dua miliar

delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Namun Komisi IV DPR RI mendukung penambahan sebesar Rp8.043.438.587.000,- (delapan triliun empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan program dan kegiatan prioritas pendukung pemulihan ekonomi nasional terutama masyarakat kelautan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta pelaku usaha perikanan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal semula sebesar Rp519.107.535.000,- (lima ratus sembilan belas miliar seratus tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp59.051.084.000,- (lima puluh sembilan miliar lima puluh satu juta delapan puluh empat ribu rupiah);
- b. Inspektorat Jenderal semula sebesar Rp87.424.408.000,- (delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp1.116.716.000,- (satu miliar seratus enam belas juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
- c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap semula sebesar Rp770.091.758.000,- (tujuh ratus tujuh puluh miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp1.335.703.210.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya semula sebesar Rp1.143.447.870.000,- (satu triliun seratus empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp3.836.392.331.000,- (tiga triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- e. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp384.597.909.000,- (tiga ratus delapan puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp394.243.213.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- f. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut semula sebesar Rp384.340.414.000,- (tiga ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp845.539.876.000,- (delapan ratus empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- g. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp966.276.909.000,- (sembilan ratus enam puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp365.843.654.000,- (tiga ratus enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp1.368.443.706.000,- (satu triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp939.705.219.000,- (sembilan ratus

tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah); dan

- i. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan semula sebesar Rp498.356.888.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan usulan penambahan sebesar Rp265.843.284.000,- (dua ratus enam puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Ada lagi?

Semulanya tolong dihapus ya sesuai tadi dengan alur masukan dari Pak Ichsan.

Oke, teman-teman Komisi IV DPR RI, setuju?
Pemerintah?

SEKJEN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI (Drs. ANTAM NOVAMBAR, S.H., M.Hum.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

PERGANTIAN KETUA RAPAT

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Seluruh rangkaian Rapat Kerja sudah selesai dilaksanakan dengan waktu yang tidak terlalu relative lama menurut ukuran saya, inikan lamanya kan karena urusan angka. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih semoga kita mampu merealisasikan seluruh apa yang akan dilaksanakan dan mengevaluasi apa yang telah dikerjakan. Masih perlu pernyataan dari Pemerintah, saya pikir cukup ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih, dengan mengucapkan *alhamdulillah* Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan resmi saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Sampurasun.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.40 WIB)

Jakarta, 7 Juni 2021
a.n. KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Tommy
NIP. 196508171988031002